

BAB III
PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DAN PERGURUAN TINGGI
MUHAMMADIYAH

III.1 Sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pendidikan tinggi di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu bentuk jenjang pendidikan yang belum begitu lama usianya. Dibandingkan dengan bentuk pendidikan lainnya yang lebih rendah jenjangnya, terutama yang diadakan secara mandiri oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat seperti sistem pendidikan pesantren. Semenjak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, telah terdapat usaha dan tekad yang kuat untuk mendirikan perguruan tinggi terutama oleh Pemerintah Republik Indonesia yang masih baru ini, walaupun sebenarnya pendirian perguruan tinggi tersebut telah lebih dulu dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Pendirian perguruan tinggi yang pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Institusi perguruan tinggi tersebut adalah *Technische Hooge School* di Bandung pada tahun 1920⁹¹, pendirian tersebut didesak akan kebutuhan terhadap tersedianya tenaga ahli yang berpendidikan tinggi.

Kekurangan ahli ini disebabkan karena terputusnya hubungan dengan negeri Belanda selama Perang Dunia I, sehingga pemerintah dan industri mengalami kesulitan yang cukup berat berkenaan dengan tidak dapat berfungsinya dengan lancar

⁹¹ Prof. Dr. S. Nasution, M.A. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. 1994. Hlm. 142. Perguruan Tinggi Teknik pada mulanya diusulkan untuk didirikan di Batavia namun karena suatu dan lain hal akhirnya didirikan di Bandung.

aktifitas yang menunjang kehidupan sehari-hari terutama di bidang industri⁹². Dengan demikian disadari bahwa daerah Hindia-Belanda harus mempunyai lembaga pendidikan tinggi sendiri.

Pada tahun 1909 dibentuk *Indische Universiteitsvereening*, yang berarti suatu badan yang akan memperjuangkan didirikannya Universitas di Hindia-Belanda. Perkumpulan ini terutama didukung oleh orang Indo-Belanda, yang akan menetap seterusnya di Hindia-Belanda, namun usaha tersebut tidak segera berhasil. Lalu pada tahun 1913 dibentuk suatu panitia dengan tujuan untuk menyarankan kepada pemerintah tentang pendirian Universitas, akan tetapi dalam suatu laporan dinyatakan bahwa belumlah saatnya untuk mewujudkan rencana yang diusulkan tersebut. Terdapat keragu-raguan apakah orang-orang Bumiputera dapat dididik dalam ilmu pengetahuan yang setaraf dengan orang barat⁹³

Akan tetapi keadaan cepat berubah, dan pada tahun 1918 didirikan *Technische Onderwijs Commissie*, suatu panitia pendidikan teknik yang memberikan saran-saran kepada pemerintah tentang cara mengatasi kebutuhan pendidikan teknik lanjutan. Anggota-anggota panitia ini antara lain adalah kepala-kepala dinas pemerintahan, seperti kepala irigasi, pertambangan, tenaga air, listrik, kereta api juga kepala-kepala pabrik, wakil departemen pengajaran, kepala sekolah teknik menengah dan inspektur sekolah menengah. Dalam peresmian panitia ini Gubernur Jenderal menyatakan,

⁹² “Surat Direktur Pekerjaan Umum J. Homan van der Heide kepada Gubernur Jenderal Idenburg” tanggal 27 Januari 1913 nomor 1606/D. dalam: Depdikbud RI. *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 1977. hlm.1.

⁹³ “Surat Direktur Pendidikan dan Agama G.A.J. Hazeu kepada Gubernur Jenderal Idenburg” tanggal 27 November 1914 nomor 23814. dalam: *Ibid.* hlm 3.

berbeda dengan sebelumnya bahwa dengan dibentuknya panitia ini maka dapat diakui anggapan mengenai perlunya pendidikan tinggi, dan tugasnya adalah mencari jalan terbaik untuk mewujudkannya⁹⁴.

Pada tahun 1919 dimulai pembangunan gedung perguruan tinggi teknik di Bandung yang secara resmi dibuka pada tahun 1920 dengan nama *Technische Hooge School* (T.H.S) atau Sekolah Tinggi Teknik. Dalam tahun akademis 1920-1921 Perguruan Tinggi tersebut mempunyai 28 mahasiswa di antaranya 22 orang Belanda, 4 Cina dan 2 orang Bumiputera. Adapun dari golongan Bumiputera yang pertama kali lulus adalah pada tahun akademis 1925-1926, yang berjumlah 4 orang dan diantaranya terdapat Ir. Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia⁹⁵.

Walaupun demikian sebelum pendirian di Bandung tersebut, oleh pemerintah kolonial telah didirikan beberapa lembaga pendidikan yang mengacu kepada arah didirikannya perguruan tinggi, yakni perguruan tinggi dalam arti suatu lembaga yang menyelenggarakan pengajaran, pendidikan dan penelitian di atas tingkat perguruan menengah ke atas⁹⁶, yang antara lain adalah:

- *Dokter-Java-School*, didirikan pada tahun 1851 di Batavia, kemudian berganti nama menjadi *STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen)*, yang bergerak di bidang kedokteran.

⁹⁴ Nasution. *Op. cit.*, Hlm. 143

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 144.

⁹⁶ Koesnadi Hardjosoemantri. *Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan (sebuah tinjauan aspek hukum)*. Dirjen Dikti Diknas. Jakarta. 2001. hlm. 2.

- *Opleiding-School voor Inlandsche Rechtskundigen* didirikan pada tahun 1909 di Batavia, yang sejak tahun 1922-1928 diberi nama *Rechtsschool*⁹⁷, yang bergerak di bidang hukum.

Semenjak pendirian perguruan tinggi di Bandung oleh pemerintah kolonial tersebut barulah banyak berdiri lembaga pendidikan dengan status sebagai perguruan tinggi, antara lain secara berturut-turut adalah sebagai berikut⁹⁸:

1. Perguruan Tinggi Hukum (*Rechthoogeschool*) di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1924
2. Perguruan Tinggi Kedokteran (*Geneeskundige Hogeschool*) di Batavia pada tanggal 16 Agustus 1927.
3. Akademi Pemerintahan (*Bestuursacademie*) di Batavia pada tanggal 24 Oktober 1938.

Pada saat-saat menjelang meletusnya Perang Dunia II, dengan kemungkinan besar terputusnya hubungan kontak dengan negeri Belanda, mulailah timbul gagasan untuk menggabungkan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Hindia Belanda ke dalam satu universitas. lalu dalam rangka persiapan pendirian universitas tersebut maka didirikanlah⁹⁹:

1. *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* (Fakultas Sastra dan Filsafat) di Batavia, pada tanggal 1 Oktober 1940.

⁹⁷ Prof. Dr. M. Enoch Markum (edt). *Pendidikan Tinggi dalam perspektif sejarah dan perkembangannya di Indonesia*. UI Press. Jakarta. 2007. hlm 27.

⁹⁸ Hardjasoemantri. *Op.cit.* hlm 3.

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 4.

2. *Faculteit Landbouwkundige* (Fakultas Pertanian) di Batavia pada tanggal 1 September 1941 (namun hanya pada tingkat pertama untuk sementara lalu kemudian seterusnya dipindahkan ke Bogor).

3. *Gouvernements Instituut voor Lichamelijke Opvoeding; GIV-LO* (Akademi Pendidikan Jasmani) di Surabaya, dalam tahun 1940

Namun rencana untuk pendirian *Universiteit van Indonesie* tersebut tidak dapat terwujud dalam waktu dekat dikarenakan pendudukan Jepang.

Pada perkembangan selanjutnya di zaman pendudukan Jepang semua Perguruan tinggi praktis telah ditutup, walaupun ada beberapa yang pernah dibuka kembali. Pada masa itu yang masih dipertahankan adalah sekolah umum dan kejuruan. Namun dalam rangka 'Perang Asia Timur Raya', maka segala-galanya dikerahkan untuk kepentingan usaha memenangkan perang. Tujuan pendidikan pada zaman Jepang tidak lain ialah agar pemuda memiliki jiwa dan semangat militer sepenuhnya yang bisa mengabdikan diri kepada Jepang dan siap untuk menjadi angkatan perang¹⁰⁰.

Adapun hal penting yang patut dicatat selama masa pendudukan Jepang, pada perguruan-perguruan tinggi dan pada sekolah-sekolah umumnya di Indonesia, adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga permulaan dari

¹⁰⁰ Helius Syamsuddin, dkk. Anhar Gonggong (edt). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Depdikbud Dirjen Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta. 1993. hlm. 5.

‘Indonesianisasi’ staf dan pengajar. Akan tetapi dari segi kegiatan akademis dapat dikatakan perguruan-perguruan tinggi pada waktu itu praktis lumpuh.¹⁰¹

III. 1. 2 Perkembangan Pendidikan Tinggi Umum Negeri

Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi mengalami berbagai tantangan, sebagaimana juga tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia secara umum pada waktu itu.

Dengan kembalinya pemerintah pendudukan Belanda ke bumi Indonesia maka agenda pendidikan tinggi pemerintah Belanda yang sempat terbengkalai dilanjutkan kembali. Dalam tahun 1946 oleh Pemerintah Pendudukan Belanda telah didirikan *Universiteit van Indonesie*, sebagai gabungan dari perguruan-perguruan tinggi yang didirikannya sebelum tahun 1942, yang berpusat di Jakarta dengan *Faculteit-faculteitnya* antara lain: di Jakarta (Hukum, Kedokteran, Ekonomi dan Sastra), di Bogor (Pertanian dan Kedokteran Hewan), di Bandung (Tekhnik), kemudian diperluas lagi dengan *Faculteit-faculteit* di Surabaya (Kedokteran Gigi) dan di Makassar (Ekonomi).¹⁰²

Sementara itu pemerintah Republik Indonesia yang harus mengungsi dari daerah pendudukan Belanda pada tanggal 17 Februari 1946 di Ibukota Republik

¹⁰¹ Hardjosoemantri. *Op.cit.* hlm. 6; Lihat juga Syamsuddin. *Op.cit.* hlm 6.

¹⁰² Markum. *Op.cit.* hlm. 28, 31.

Indonesia, yang pada waktu itu berada di Yogyakarta, mendirikan Sekolah Tinggi Teknik melalui Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia¹⁰³.

Dalam masa itu pula, pada bulan Februari 1946 didirikan Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Malang. Lalu Perguruan Tinggi Kedokteran bagian II dibuka tanggal 4 maret 1946 di Solo dan bagian I dibuka tanggal 5 maret 1946 di Klaten kesemuanya itu tergabung dalam Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, yang berpusat/berkedudukan di Klaten. Lalu pada bulan November 1946 dibuka Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di kota Bogor oleh Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia. Namun dengan meletusnya peperangan pada bulan Juli 1947 (agresi militer Belanda ke-1), maka perguruan tinggi tersebut dipindahkan ke Klaten, sama halnya dengan Perguruan-Perguruan Tinggi yang didirikan di Malang, yang sebagian juga mengungsi ke Klaten dan Yogyakarta¹⁰⁴. Selama periode revolusi fisik ini, perguruan tinggi telah ikut serta aktif mendukung pemerintah dalam lapangan kenegaraan, ekonomi, pertahanan dan terutama dalam usaha pembinaan pendidikan dan pengajaran.

Langkah selanjutnya setelah meredanya ketegangan dan menjelang pengakuan kedaulatan, Pemerintah Republik Indonesia menimbang perlu memusatkan Perguruan Tinggi Negeri menjadi satu universitas. Dengan Peraturan Pemerintah 1949 no.23¹⁰⁵, semua Perguruan Tinggi negeri di Yogyakarta untuk sementara dengan tidak

¹⁰³ Syamsuddin. *Op. cit.* hlm. 23. Dengan demikian pendidikan tinggi pada waktu itu menjadi terpecah yaitu dengan adanya Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi daerah pendudukan Belanda, hal ini terjadi semenjak diambil alihnya perguruan tinggi peninggalan Belanda yang dijalankan oleh pihak Republik Indonesia.

¹⁰⁴ Syamsuddin. *Op.cit.* hlm. 23-24; Lihat juga Hardjasoemantri. *Op.cit.* hlm. 7.

¹⁰⁵ Hardjasoemantri. *Op.cit.* hlm. 9.

mengubah keadaan dan susunannya masing-masing, digabungkan menjadi suatu universitas dengan nama “Universiteit Gadjah Mada” yang berkedudukan di Yogyakarta¹⁰⁶. Pada tanggal 19 Desember 1949 diresmikanlah berdirinya “Universiteit Negeri Gadjah Mada” ini sebagai Universitas yang pertama, yang berkedudukan di Yogyakarta dan mencakup fakultas-fakultas yang telah didirikan sebelumnya.¹⁰⁷

Pada periode pasca “revolusi fisik” Pemerintah Republik Indonesia kemudian membentuk suatu ‘panitia persiapan Negara (PPN)” yang salah satu tugasnya antara lain adalah menyelidiki lembaga-lembaga Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pendudukan Belanda sebagai persiapan untuk mengambil alih lembaga-lembaga tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam lembaga-lembaga Perguruan Tinggi Republik Indonesia¹⁰⁸.

Kemudian pada tanggal 6 Januari 1950 dilaksanakanlah pengambil alihan *Universiteit van Indonesie* milik pemerintah kolonial Belanda. Dengan Undang-Undang Darurat no.7 tahun 1950, dan pada tanggal 2 Februari 1950 Ir. Soerachman diangkat sebagai presiden *Universiteit Indonesia*, yaitu gabungan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta dengan *Universiteit van Indonesie* termasuk dengan semua cabang-cabangnya.

¹⁰⁶ Syamsuddin. *Op.cit.* hlm. 22-24. *Universiteit Gadjah Mada* tersebut pada awalnya diusahakan oleh suatu yayasan yang bernama Balai Perguruan Gadjah Mada yang telah memiliki fakultas hukum dan kesusasteraan lalu pada tahun 1949 diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia termasuk semua fakultas yang dimilikinya.

¹⁰⁷ Markum. *Op.cit.* hlm. 31.

¹⁰⁸ Hardjasoemantri. *Op. cit.* hlm. 10.

Pada perkembangan berikutnya di tahun 1950-an didirikan pula beberapa perguruan tinggi baru yang mandiri di beberapa daerah dengan sistem universitas beserta fakultas-fakultasnya, pendirian Perguruan Tinggi baru ini merupakan pengembangan dari fakultas-fakultas Universitas Indonesia yang tersebar di beberapa daerah dan juga fakultas-fakultas Universitas Gadjah Mada ditambah dengan pendirian fakultas-fakultas baru yang menjadi kelengkapan Universitas tersebut, adapun pembukaan Perguruan Tinggi tersebut antara lain adalah¹⁰⁹:

1. Universitas Airlangga di Surabaya (PP. no 57 tahun 1954, mulai berlaku tanggal 10 November 1954).
2. Universitas Hasanuddin di Makassar (PP. no 23 tahun 1956, mulai berlaku tanggal 1 September 1956).
3. Universitas Andalas di Bukittinggi (PP. no 24 tahun 1956, mulai berlaku tanggal 1 September 1956).
4. Universitas Padjajaran di Bandung (PP. no 37 tahun 1957, mulai berlaku tanggal 11 September 1957).
5. Universitas Sumatera Utara di Medan (PP. no 48 tahun 1957, mulai berlaku tanggal 30 Oktober 1957).

¹⁰⁹ Allen, Raymond B. et, al. *Higher Education in Indonesia (Reports On Indonesian Institution Of Higher Education)*. Bureau for Coordination of Higher Education, USOM Indonesia. 1958. hlm 16-19; Lihat juga: Hardjasoemantri. *Op. cit.* hlm 12.

6. Institut Teknologi Bandung¹¹⁰ di Bandung (PP. no 6 tahun 1959, mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1959).

Dalam rangka penyempurnaan susunan Kabinet Kerja, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia no 97 tahun 1961, terhitung tanggal 3 Maret 1961, diangkatlah Prof. Iwa Kusumasumantri, S.H. sebagai Menteri untuk Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dengan demikian, segala urusan Perguruan Tinggi yang selama ini diurus dalam satu tangan bersama dengan kepengurusan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah oleh Dept. PP dan K, mulai dipisahkan dalam satu departemen sendiri, yaitu Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP)¹¹¹.

Pada perkembangan berikutnya periode yang tercatat sebagai periode dengan pertumbuhan Perguruan Tinggi Negeri yang paling banyak terjadi pada periode 1959-1965, karena pada masa itu setiap Daerah Tingkat I (Dati I) minimal memiliki satu perguruan tinggi negeri, bahkan kondisi ini kemudian dijadikan salah satu persyaratan bagi pemekaran daerah untuk menjadi Daerah Tingkat I. faktor ini tampaknya merupakan faktor yang cukup menentukan penambahan jumlah perguruan tinggi di Indonesia pada waktu itu. Pendirian perguruan tinggi terus dilanjutkan sehingga pada akhir tahun 1965 pemerintah telah mendirikan 29 perguruan tinggi. Penambahan

¹¹⁰ Institute ini pada waktu itu merupakan bentuk baru dari Perguruan Tinggi di Indonesia walaupun secara historis ia merupakan bentuk perguruan tinggi pertama di Bumi Indonesia yang didirikan pada tahun 1920 oleh pemerintah colonial Belanda, institute merupakan suatu lembaga baru yang bukan Universitas tetapi mempunyai tingkatan sebagai perguruan tinggi dan setara dengan Universitas.

¹¹¹Hardjasoemantri. *Op.cit.* hlm 13.

jumlah perguruan tinggi pada masa ini menjadi semakin besar jumlahnya karena adanya pendirian universitas, sekolah tinggi dan institut swasta serta juga kedinasan di luar Departemen PTIP¹¹².

III. 1. 3 Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Berbeda dengan sejarah perkembangan perguruan tinggi negeri umum di Indonesia, perkembangan pendidikan tinggi Islam negeri di Indonesia secara lembaga baru mulai berkembang pada masa setelah kemerdekaan. Dan pada perkembangan awalnya lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan tersebut lebih banyak diusahakan oleh kalangan swasta, sementara di bidang agama pemerintah nampaknya lebih banyak berkonsentrasi pada masalah pendidikan dasar, menengah serta kejuruan yang kebanyakan berupa sekolah guru agama.

Setelah Indonesia merdeka kemudian didirikanlah Departemen Agama dengan tugas pokoknya yaitu memberikan pelayanan keagamaan; mengembankan pendidikan agama; membina kerukunan antar umat beragama¹¹³. Dengan demikian departemen ini secara kelembagaan disertai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dalam lembaga-lembaga

¹¹² Syamsuddin. *Op. cit.* hlm 93.

¹¹³ Fuad Jabali (edt). *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*. UIN Jakarta Press. Jakarta. 2003. hlm. 61.

pendidikan agama yang ada¹¹⁴. Lembaga pendidikan berdasarkan agama Islam ada yang berstatus negeri dan ada yang berstatus swasta.

Usaha untuk merintis pendidikan tinggi Islam pada periode awal ini, juga dilakukan oleh para tokoh-tokoh besar Indonesia antara lain seperti Muhammad Hatta, M. Natsir, K.H.A Wahid Hasyim, dan K.H Mas Mansur. Dimana rintisan dan peletakan awal pendidikan tinggi Islam kemudian terbentuk pada tanggal 8 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Mudzakir, sebagai bentuk realisasi kerja sebuah yayasan (Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam) yang diketuai oleh Muhammad Hatta dengan sekretaris M. Natsir¹¹⁵. Dalam memorandumnya, Hatta memang tegas sekali menyatakan bahwa agama merupakan salah satu tiang kebudayaan bangsa. Maka pendirian perguruan tinggi agama Islam dianggap sebagai sesuatu yang amat mendesak. Tujuannya ialah untuk menghasilkan alim-ulama yang intelek.

Namun pada masa revolusi sebagaimana nasib perguruan tinggi lainnya maka STI ini pun harus dipindahkan seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan RI dari Jakarta ke Yogyakarta, lalu STI pun ikut serta pindah ke Yogyakarta dan secara formal kembali dibuka aktif pada bulan april 1946. Pada bulan November 1947 dibentuk panitia perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) yang kemudian secara resmi didirikan pada tanggal

¹¹⁴ Hal inilah yang menjadi dasar pemisahan (dikotomi) pengembangan dan pembinaan sistem persekolahan di Indonesia antara yang berdasarkan agama atau umum baik yang dikelola oleh swasta maupun negeri, sampai saat ini sekolah-sekolah agama negeri ataupun swasta termasuk pesantren berada di bawah naungan Departemen Agama. Lihat: Karel A.Steenbrink. *Pesantren, Madrasah, Sekolah –pendidikan Islam dalam kurun modern*. PT. Pustaka LP3ES. Jakarta. 1994. hlm. 99.

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 19.

22 maret 1948 di Yogyakarta, dengan mengembangkan empat fakultas yakni¹¹⁶:
Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi & Fakultas Pendidikan

Pada waktu didirikannya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta, pemerintah juga mengambil kebijakan terpisah terhadap eksistensi perguruan tinggi agama. Maka untuk mengakomodasi tuntutan kebutuhan pendidikan tinggi bagi umat Islam, secara terpisah pemerintah Republik Indonesia juga mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam, yaitu dalam bentuk Fakultas Agama dari UII yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang berkedudukan di Yogyakarta, sesuai Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1950¹¹⁷.

Usaha untuk memperkuat dasar kelembagaan pendidikan Islam terus dilakukan, maka dalam konteks institusionalisasi pendidikan Islam dan juga untuk mempersiapkan guru, tokoh dan pemimpin agama, didirikanlah Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, berdasarkan penetapan Menteri Agama RI no. 1 tahun 1957¹¹⁸. Dengan Dekannya yang pertama Mahmud Yunus beserta wakilnya Bustami A. Gani, ADIA adalah sebagai bentuk mata rantai yang berkesinambungan dalam usaha mendirikan Pendidikan Perguruan Agama pada tingkat perguruan tinggi sebagai lanjutan dari SGA/PGA dan SGHA. Sehingga secara administratif

¹¹⁶ Mahmud Junus. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia..* Pustaka Mahmudiah. Jakarta. 1960. hlm. 251.

¹¹⁷ Tim penulis, Badri Yatim (edt). *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam –sejarah dan profil pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1957-2002.* IAIN Jakarta Press. Jakarta. 2002. hlm. 20.

¹¹⁸ Pendirian ADIA ini juga merupakan prakarsa atas Mahmud Junus dan Jawatan Pendidikan Agama (Djapenda), yang melihat adanya ke'aneh'an pada struktur pimpinan dua sekolah Kementerian Agama yang lazim disebut SGHA dan PGA, dimana pucuk pimpinannya selalu didominasi oleh alumnus HIK yang notabene 'pengetahuan' agamanya kurang. Untuk itu Djapenda berkeinginan agar dua sekolah itu dipimpin oleh kader Departemen Agama sendiri. Lihat: *Ibid.* hlm. 60-61.

persyaratan memasuki ADIA adalah mereka yang berijazah SGHA dan PGA atau yang dianggap sederajat dengan sekolah-sekolah tersebut, dan juga telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai pegawai negeri, inilah yang membedakannya dengan PTAIN yang ada di Yogyakarta, dimana ADIA lebih bersifat kedinasan dan sangat berorientasi keguruan¹¹⁹, walaupun pada perkembangannya tidak hanya fakultas keguruan yang berkembang di dalamnya.

Dalam rangka mengintegrasikan system perguruan tinggi Islam dan sekaligus mutu pendidikannya, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 11 tahun 1960, yang berisi tentang pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang diberi nama “Al-Djamiah Al-Islamiah Al-Hukumiah” pada tanggal 9 mei 1960. Kemudian secara resmi dibuka oleh menteri agama waktu itu K.H.M. Wahib Wahab. Al-Djamiah ini merupakan gabungan dari PTAIN di Yogyakarta dengan ADIA di Jakarta, sehingga kedua Perguruan Islam itu telah lebur menjadi satu IAIN. Pada ‘konsiderans’ peraturan pemerintah no. 11 tahun 1960 tersebut, tertuang bahwa kebutuhan untuk mengadakan IAIN adalah untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat¹²⁰.

¹¹⁹ *Ibid.* hlm.62-63. Di bawah kepemimpinan Mahmud Yunus selaku Direktur/Dekan yang pertama, ADIA benar-benar merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang hanya menerima mahasiswa berstatus pegawai negeri dalam rangka *Studie Opdracht* (tugas belajar). Setiap tahun, atas usul Djapenda, Menteri agama menunjuk sejumlah pegawai negeri untuk ditugas belajarkan.

¹²⁰ *Ibid.* hlm. 22. Lihat juga: “Laporan Penelitian dan Seminar Pendidikan pada Perguruan Agama” yang diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Penelitian Keagamaan –Departemen Agama. Jakarta. 1971. hlm. 279.

Dalam memahami sejarah perkembangan Perguruan Tinggi di Indonesia ini tentu tidak dapat dilepaskan peran kalangan swasta. Dalam banyak hal apa yang mereka usahakan justru menjadi cikal bakal system Perguruan Tinggi yang akhirnya dimiliki oleh Negara. Sebagai contoh Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang kemudian menjadi Universitas Negeri Gajah Mada.

Begitu pula halnya dengan sejarah perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia dimana ia memperoleh bentuk awalnya dari suatu lembaga pendidikan tinggi yang di usahakan secara mandiri oleh beberapa tokoh nasional¹²¹, dengan tidak melalui jalur formal kelembagaan Negara, lalu dengan itu ia berhasil mengembangkan dirinya menjadi suatu sistem Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang pada akhirnya tersebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Berikut adalah perguruan-perguruan tinggi Islam yang di usahakan oleh kalangan swasta sampai menjelang tahun 1960:

1. *Sekolah Tinggi Islam* yang didirikan oleh Persatuan Guru Agama Islam (P.G.A.I) pada tanggal 9 Desember 1940 di Minangkabau¹²². Perguruan Islam Tinggi ini dapat dikatakan sebagai yang pertama kali tercatat namun usianya tidak berjalan lama karena harus ditutup berkenaan dengan masuknya tentara Jepang.

¹²¹ Seperti M. Hatta, M.Natsir, Mas Mansyur, Wahid Hasyim. Terutama dalam hal ini adalah M. Hatta dkk. melalui yayasan yang diketuainya Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam yang mencetuskan lahirnya STI yang kemudian berkembang menjadi UII.

¹²² Mahmud Junus. *Op.cit.* hlm. 103.

2. *Universitas Islam Indonesia* didirikan pada masa pendudukan Jepang 8 Juli 1945 dengan nama *Sekolah Tinggi Islam (STI)* yang berubah menjadi U.I.I pada tanggal 22 Maret 1948.
3. *Perguruan Tinggi Islam Jakarta*, didirikan pada tanggal 14 November 1951 oleh Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta. Bisa dikatakan bahwa perguruan ini merupakan Perguruan Tinggi Islam Swasta yang pertama didirikan setelah masa revolusi berakhir. Pada tahun 1959 P.T.I Jakarta ini kemudian dirubah menjadi *Universitas Islam Jakarta*.
4. *Perguruan Tinggi Islam Indonesia Medan* didirikan di Medan pada tanggal 7 Januari 1952¹²³. Kemudian mengalami perubahan pada tahun 1956 menjadi *Universitas Islam Sumatera Utara (U.I.S.U)*.
5. *Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah* didirikan di Bukit Tinggi pada tanggal 27 Radjab 1373 H (tahun 1953) dan mempunyai satu fakultas yaitu Fakultas Hukum Islam. Pada perkembangan berikutnya pada tanggal 12 Oktober 1957 perguruan tinggi ini dirubah namanya menjadi *Universitas Darul Hikmah* dan mempunyai 5 fakultas.
6. *Universitas Muslim Indonesia Makassar*, didirikan pada tahun 1954 yang kemudian pendirian tersebut dikukuhkan dengan Yayasan Wakaf Universitas

¹²³ Perguruan ini merupakan salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua di Indonesia yang masih berlangsung hingga sekarang, informasi mengenainya pun dapat diakses langsung melalui homepage perguruan ini, yaitu melalui: www.uisu.co.id. (29 April 2008; pk1 20.15).

Muslim Indonesia, dengan akte Notaris no. 28 tanggal 9 Maret 1955. U.M.I Makassar ini didirikan dengan langsung mempunyai dua buah fakultas.

7. *Perguruan Tinggi Islam Tjokroaminoto*, yang didirikan pada bulan Oktober 1955 di Surakarta oleh suatu panitia yang diketuai oleh Dr. Moedjono Soesrowirjono. Perguruan tinggi ini pada awalnya hanya memiliki satu fakultas yakni Fakultas Hukum Islam/Ilmu Kemasyarakatan. Kemudian diubah namanya menjadi *Universitas Tjokroaminoto Surakarta* dan fakultasnya pun ditambah menjadi lima¹²⁴.
8. *Perguruan Islam Tinggi Palembang* didirikan oleh Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan pada bulan Desember 1957. Perguruan ini hanya terdiri dari satu fakultas yaitu Fakultas Hukum Islam. Sampai pada tahun 1959 dosennya hanya berjumlah 12 orang¹²⁵.

Perkembangan ini berlanjut terus dalam periode berikutnya yaitu setelah tahun 1960 suatu periode yang memang tidak dibahas secara khusus dalam penulisan skripsi ini karena penulis beranggapan periode pasca 1960 kurang relevan dengan pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah, begitu pula dengan perguruan tinggi swasta yang bersifat umum yang mana tidak diberi penjelasan tersendiri walaupun penulis rasa masalah tersebut cukup menarik bila dibahas dalam suatu penulisan yang lain.

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 228-231

¹²⁵ *Ibid.* hlm. 187-188: Op.cit. Hasan Asari. hlm. 236.

III. 2 Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Demikianlah perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, dengan melihat perkembangan tersebut maka dapat kita katakan secara obyektif bahwa ternyata Muhammadiyah bukanlah organisasi ke-Islaman atau umum yang pertama kali mengusahakan berdirinya suatu perguruan tinggi secara swasta.

Namun bagaimanapun gagasan atau ide untuk menyelenggarakan suatu bentuk pendidikan tinggi telah lama dicetuskan bahkan hal tersebut merupakan suatu keputusan yang sudah bulat pada saat kongres (Muktamar) Muhammadiyah seperempat abad pada tahun 1936 di Batavia (Jakarta). Perguruan tinggi yang direncanakan merupakan perguruan tinggi teknik dan dagang yang dijiwai oleh pelajaran agama Islam¹²⁶.

Tekad tersebut merupakan dorongan yang kuat terhadap kebutuhan akan lahirnya kader-kader Muhammadiyah yang berpendidikan tinggi, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang mampu mendukung gerak perjuangan dan perkembangan amal usaha Muhammadiyah yang sedang meluas dan berkembang. Cita-cita ini pulalah yang melahirkan semboyan perlu adanya kader-kader muda Muhammadiyah yang mempunyai kemampuan sebagai “ulama yang intelek” atau “intelek yang ulama”.

¹²⁶ Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. *Da'wah Islamijah Tugas Sutji Setiap Muslim*. dalam *Almanak Muhammadiyah 1380*. PP Muhammadiyah Madjlis Taman Pustaka. 1960-1961. hlm. 112 Lihat juga Abdul Munir Mulkhan. *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 1990. hlm 40.

III. 2. 2 Perintisan Awal Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sumatera Barat

Namun upaya untuk mewujudkan cita-cita itu terhambat dengan pecahnya Perang Dunia II. Disusul kemudian dengan masuknya tentara Jepang yang menjatuhkan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Suasana itu memaksa cita-cita besar Muhammadiyah untuk mendirikan perguruan tingginya terhenti untuk sementara.

Tetapi, di Sumatera Tengah (sekarang Sumatera Barat) cita-cita tersebut tetap hidup. Ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Tinggi Muhammadiyah pada tahun 1943. Sekolah tinggi ini mengambil tempat di kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang¹²⁷. Untuk memimpin persiapan berdirinya Sekolah Tinggi Muhammadiyah tersebut dipercayakan kepada A. Malik Ahmad selaku Ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah Sumatra Barat. Namun hal tersebut tidak dapat segera terwujud di karenakan kondisi yang cukup sulit pada waktu itu di bawah pemerintah pendudukan Jepang¹²⁸.

¹²⁷Keberadaan kompleks perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang diawali dengan diresmikannya HIS met de Qur'an Muhammadiyah pada tanggal 1 Juli 1927, melalui perjalanan perkembangan aktivitasnya lalu bermacam sekolah Muhammadiyah lainnya pun mulai bermunculan di dalam kawasan itu pula sehingga tempat tersebut lebih dikenal sebagai kompleks perguruan Muhammadiyah sedangkan nama Kauman tersebut berarti suatu tempat dimana masyarakatnya memiliki ikatan ideologi dan dan perjuangan yang sama yaitu Muhammadiyah nama tersebut sendiri diambil dari nama desa tempat tinggal KH Ahmad Dahlan dan tempat Muhammadiyah pertama kali didirikan. Lihat: H. Hasan Ahmad. *Dinamika Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang*. dalam *Suara Muhammadiyah* no.17. 16-31 Agustus 2006. hlm 28-29.

¹²⁸ Pada masa itu organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat cukup banyak mengupayakan pembentukan barisan-barisan pejuangnya sendiri, barisan tersebut semakin resmi terlihat saat masa revolusi yaitu barisan Hisbullah Divisi Imam Bonjol yang didirikan oleh Muhammadiyah Sumatera Barat pada 7 november 1945, di bawah pimpinan Kol. Syamsuddin dan Letkol Anwar Bey, yang mana kedua perwira tersebut merupakan anak didik Muhammadiyah, alumni dari Kulliyatul Muballighien

Perintisan untuk membangun Sekolah Tinggi Muhammadiyah tersebut diawali dengan pengumpulan dana dari para pelajar sekolah-sekolah Muhammadiyah seluruh Sumatera Barat setiap tanggal 7 dan 17. Tanggal ini sangat populer dengan nama Hari Asia Timur Raya, yang oleh Muhammadiyah dinamakan Hari Sekolah Tinggi Muhammadiyah dan Hari Gotong Royong. Pengumpulan dana ini kemudian dikenal dengan nama “gerakan sen ilmu”. Dan hasil “gerakan sen ilmu” para pelajar ini yang diiringi dengan dukungan dan bantuan warga Muhammadiyah dan masyarakat, maka akhirnya gedung persiapan Sekolah Tinggi Muhammadiyah itu dapat didirikan.

Sesuai dengan kondisi pada waktu itu, bangunan sekolah tinggi itu baru bertiang bambu, beratap rumbia, berdinding tadir, dan berlantaikan semen murni, yaitu tanah yang dicampur pangangan batu kapur. Hal ini dapat dimaklumi bahwa pada masa pendudukan Jepang itu amatlah sulit untuk mendapatkan bahan bangunan seperti semen, bahan besi, atap seng, paku serta bahan bangunan lainnya disamping juga kemungkinan harganya yang sulit terjangkau. Sedangkan untuk mendapatkan bahan kayu diambil sendiri dari hutan oleh pelajar dan warga Muhammadiyah secara gotong royong¹²⁹.

Muhammadiyah Sumatera Barat, yang kemudian memasuki pendidikan perwira Giyugun dimasa pendudukan Jepang. Lihat: H. Hasan Ahmad. *Dinamika Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang(2)*. dalam *Suara Muhammadiyah* no.17. 1-15 September 2006. hlm 28. Lebih lanjut mengenai Hizbullah lihat juga: Deliar Noer. *Partai Islam Di Pentas Nasional*. Penerbit Mizan. Jakarta. 2000. hlm. 30;50;60; 107-191.

¹²⁹ H. Hasan Ahmad. *Sejarah Lahirnya PTM Pertama di Indonesia*. Artikel dalam terbitan resmi Muhammadiyah *Suara Muhammadiyah* no.17. 1-15 September 2006. hlm 28; H. Hasan Ahmad adalah salah seorang anggota dari Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, lalu sebagai

Pada awal tahun 1944 gerakan pembangunan sekolah tinggi Muhammadiyah ini sudah mulai membentuk kelompok studi dengan pesertanya yang terdiri dari guru-guru Muhammadiyah yang berijazah setara dengan sekolah lanjutan atas. Namun hal tersebut tidak dapat berlangsung lama berkenaan dengan terjadinya agresi militer Belanda yang kedua, maka semua usaha untuk mendirikan sekolah tinggi itu terpaksa terhenti, karena seluruh anggota dan kekuatan Persyarikatan Muhammadiyah dipusatkan pada perjuangan untuk menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan RI serta memelihara amal usaha yang ada.

Selanjutnya sewaktu Padang Panjang diduduki oleh tentara Belanda, gedung persiapan Sekolah Tinggi Muhammadiyah yang dengan segala susah payah dibangun dalam Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang akhirnya ikut hancur. Yang tinggal dan tersisa hanyalah puing-puingnya yang berserakan. Hal yang sama juga dialami oleh hampir seluruh bangunan yang ada di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang¹³⁰.

Sesudah peristiwa penyerahan kedaulatan kepada pemerintahan Republik Indonesia, Muhammadiyah kembali memulihkan amal usahanya yang hancur selama pendudukan kolonial Belanda di masa revolusi itu. Gedung-gedung dan sarana pendidikan direhab atau dibangun kembali.

Perhatian utama pada waktu itu ditujukan kepada perbaikan dan pembinaan kader ulama, zu'ama, umara, guru, dan mubaligh dengan mendirikan kembali

Sekretaris II dari Dewan Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang pertama di Padang Panjang tersebut.

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 29.

Madrasah Kulliyatul Muballighin/Muballighat, Madrasah Mu'allimin dan madrasah-madrasah Muhammadiyah lainnya¹³¹. Sejalan dengan itu Muhammadiyah juga harus memulihkan dan mengembangkan kembali kekuatan organisasinya sehingga menjadi solid kembali. Dalam masa awal pemerintahan Republik Indonesia yang baru ini perlu pula dicatat bahwa sebagian besar pimpinan dan kader-kader Muhammadiyah harus disumbangkan dan berpartisipasi bagi pembangunan bangsa dan negara, guna mengisi kebutuhan tenaga yang professional dalam usaha membangun tubuh pemerintahan RI yang kuat. Situasi seperti ini terjadi tidak saja di Sumatera Tengah, tapi juga dialami Muhammadiyah secara nasional¹³².

III. 2. 3 Pembicaraan Intensif dan Pemantapan Langkah Muhammadiyah di Bidang Pendidikan Tinggi.

Pada Rapat Kerja Nasional Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah se-Indonesia pada tanggal 20-24 Februari 1954 di Bandung, permasalahan pendidikan tinggi Muhammadiyah yang dirasa cukup mendesak ini baru bisa dibicarakan lagi. Rakernas tersebut berhasil mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut:

1. Supaya PP Muhammadiyah menugaskan kepada Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pusat untuk menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Banyak disebut dalam literature-literatur yang menjelaskan mengenai masa awal berdirinya Republik ini bahwa bangsa kita memulai usaha awalnya sebagai bangsa yang berdaulat dengan hanya sedikit ahli sehingga banyak membutuhkan kader-kader terbaik bangsa yang dapat direkrut untuk mengisi kemerdekaan tersebut, nampaknya hal ini juga terjadi pada banyak kader dari Muhammadiyah.

Sedangkan penyelenggaraan fakultas-fakultasnya dapat diserahkan kepada provinsi atau daerah yang dianggap mampu.

2. Untuk mengatur dan mempersiapkan isi dan tata organisasi Universitas Muhammadiyah tersebut lebih lanjut Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dipersilahkan membentuk “panitia persiapan Universitas Muhammadiyah” yang kemudian beranggotakan: Mr. Kasman Singodimedjo, Drs. S. Danuhusodo, Mr. Sudono Harjo Sudiro, Dr. H. Ali Akbar, Dr. H. Rasyidi, Prof. Dr. Hamka, Ir. Masyhud, Ir. H. M. Sanusi, Dr. Ahmad Ramli, Drs. A. S. Broto, R. B. Sabaruddin, dan Sujadi¹³³.

Pada Konferensi Akbar Muhammadiyah Sumatera Tengah yang berlangsung di Lubuk Alung tanggal 19-23 Maret 1954, usaha pengadaan dan pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah tersebut menjadi agenda utama dan dibicarakan lagi dengan sungguh-sungguh. Akhirnya konferensi itu berhasil mengambil keputusan dan kebulatan tekad bersama untuk mendirikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, maka dari situlah bermulanya Universitas Muhammadiyah pertama di Indonesia dengan fakultas yang pertama adalah Fakultas Falsafah dan Hukum yang berlokasi di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Padang Panjang. Universitas Muhammadiyah yang dimaksud harus sudah dapat didirikan dan diresmikan pada acara milad (hari

¹³³ *Ibid.* hlm 28-29. lihat juga: “surat penjerahan dari Panitia Penyelenggara Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah Seluruh Indonesia di Bandung pada tanggal 20 s/d 24 february 1954.” (sumber: ANRI, no panggil: 1063). Lihat lampiran 3 (Gambar No: 3, 4 & 5)

ulang tahun) Muhammadiyah yang ke-43, yaitu tanggal 18 November 1955 di Kauman Padang Panjang.

Selanjutnya Konferensi Pengajaran Muhammadiyah Sumatera Tengah pada tanggal 19-21 April 1955 di Padang Panjang dalam usaha merealisasikan keputusan Konferensi Akbar Muhammadiyah di Lubuk Alung (19-23 Maret 1954) telah berhasil membentuk panitia pendiri atau pembinanya, yaitu¹³⁴:

Ketua Umum : H.A. Malik Ahmad
Wakil Ketua I : Suin Dt. Malintang Alam
Wakil Ketua II : R.I. Dt. Sinaro Panjang
Sekretaris I : Abdullah M.S. SH
Sekretaris II : A. Ghalib

Panitia tersebut juga dilengkapi dengan beberapa seksi termasuk anggota-anggotanya yang dapat menunjang usaha yang dimaksudkan, lalu kemudian panitia pembangunan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Kauman Padang Panjang tersebut sesudah dilengkapi langsung diusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan. Pada tanggal 28 Juni 1955 keputusan Konferensi Pengajaran ini diterima oleh Konferensi Luar Biasa Muhammadiyah, yang dihadiri oleh seluruh cabang dan ranting Muhammadiyah se-Sumatera Tengah. Namun keputusan tersebut masih berada pada pembahasan tingkat daerah.

¹³⁴ Hasan Ahmad. *Sejarah Lahirnya PTM Pertama di Indonesia*. www.suara-muhammadiyah.or.id (Rabu, 18 januari 2006; pkl 16.30). Lihat juga: "Perslah- Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjilis Pengadjaran sekitar Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah Niveau Konsulaat, tanggal 21 s/d 25 Djuli 1955 di Pekadangan, Pekalongan". (sumber: ANRI, no panggil: 1602)

Barulah pada tanggal 21-25 Juli 1955 di Pekajangan, Pekalongan digelar Konferensi Pengajaran Muhammadiyah dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pengajaran dan utusan-utusan dari perwakilan Muhammadiyah daerah seluruh Indonesia. Dalam konferensi tersebut dibahas masalah-masalah yang sebagian merupakan kelanjutan dari konferensi besar sebelumnya di Bandung pada tahun 1954. Pada saat itu cita-cita pendirian Universitas Muhammadiyah ini mendapat perhatian yang semakin kuat.

Akhirnya konferensi tersebut dengan mendasari pada pertimbangan-pertimbangan yang antara lain adalah¹³⁵:

1. Pemikiran pada Firman Tuhan dalam ayat-ayat suci Al-qur'an, yaitu:

a. **Surat Mudjadalah ayat 11:**

“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

b. **Surat Luqman ayat 20:**

‘Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin...’

c. **Surat Azzumar ayat 9:**

¹³⁵“Perslah- Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran sekitar Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah Niveau Konsulaat, tanggal 21 s/d 25 Djuli 1955 di Pekadjaran, Pekalongan”. (sumber: ANRI, no panggil: 1602) lihat lampiran 4; lihat juga: Jusuf Abdullah Puar. *Pendidikan Dan Perguruan Muhammadiyah*. dalam Almanak Muhammadiyah 1379 H.. PP Muhammadiyah Madjlis Taman Pustaka. Djakarta. 1959. hlm. 73-90.

“Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”¹³⁶

2. Telah cukupnya tenaga ahli dan sarjana di kalangan Muhammadiyah yang mampu dan sanggup untuk memimpin dan memberi pelajaran serta menyelenggarakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Telah banyaknya sekolah-sekolah lanjutan Muhammadiyah sehingga dirasa perlu adanya perguruan tinggi Muhammadiyah.
4. Perlunya pusat pengetahuan yang berguna untuk memperdalam dan memperkembang agama Islam dan melahirkan serta mengemukakan hasil penyelidikan baru menjadi bahan pengetahuan.
5. Perlunya mempertinggi derajat umat Islam dalam alam pengetahuan.
6. Perkembangan dunia pengajaran dan pendidikan di Indonesia yang kebanyakan mengutamakan intelektualisme yang jauh dari Islam.

Maka setelah ditinjau dari segenap sudut dan dibahas secara luas dan mendalam, akhirnya konferensi tersebut berhasil mengambil keputusan untuk bersepakat mendirikan Universitas Muhammadiyah pertama di Indonesia, diawali dengan Fakultas Falsafah dan Hukum dengan mengambil tempat di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang (Sumatera Barat).

Dengan keluarnya Keputusan Konferensi Pengajaran yang kemudian juga disahkan oleh *Sidang Tanwir*, maka terciptalah payung hukum untuk mendirikan,

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1990. hlm 908; hlm: 653; hlm: 747.

mengembangkan serta menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah dengan fakultasnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

III. 2. 4 Berdirinya Universitas Muhammadiyah

Berdasarkan hal tersebut di atas, mulai Agustus 1955 seluruh cabang dan ranting Muhammadiyah bersama anggota dan simpatisannya bersama-sama mulai bergiat dalam mengupayakan pendirian Universitas tersebut yang terutama berusaha dalam kegiatan mengumpulkan dana. Demikian pula halnya warga Muhammadiyah yang lainnya, serta masyarakat umum dari berbagai lapisan yang turut membantu Muhammadiyah dalam menjalankan cita-citanya tersebut.

Berkat kerja keras panitia dan bantuan dari seluruh pihak sebagaimana telah disebut, maka pada tanggal 18 November 1955, yaitu pada hari ulang tahun Muhammadiyah ke-43, berlangsunglah upacara peresmian berdirinya Universitas Muhammadiyah yang pertama kali di Indonesia. Fakultas pertamanya adalah Fakultas Falsafah dan Hukum yang bertempat di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang¹³⁷. Upacara peresmian itu merupakan suatu peristiwa sejarah yang mempunyai arti besar dalam langkah perjalanan Muhammadiyah menuju cita-citanya. Terlebih lagi karena, setelah diperhatikan terdapat begitu besar

¹³⁷ “Surat Fakultas Falsafah dan Hukum (Padang Pandjang) Universitas Muhammadiyah kepada PP Muhammadiyah” tanggal 3 april 1957 (sumber: ANRI, no panggil: 926) lihat lampiran 5. lihat juga: Hasan Asari. *Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia*. Dalam Abuddin Nata & Asyumardi Azra (edt). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. PT Grasindo bekerja sama dengan IAIN Jakarta. Jakarta. 2001. hlm 231. lihat lampiran 3 (Gambar No. 6).

perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap lahirnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini.

Acara tersebut dikunjungi oleh Menteri PPK, Menteri Agama RI, Gubernur Sumatera Tengah, Bupati dan Walikota se-Sumatera Tengah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan segenap Majelisnya, Pimpinan dan Dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Komandan Resimen Invantri IV, Residen Sumatera Barat, Pimpinan Organisasi dan Partai tingkat Pusat dan Daerah, ribuan utusan cabang dan ranting beserta keluarga besar Muhammadiyah dan masyarakat. Begitu pula tidak kurang dari 600 buah surat dan surat ucapan selamat beserta karangan bunga yang diterima, di antaranya dari Perdana Menteri, Menteri-menteri, Gubernur, Pimpinan dan tokoh masyarakat serta perwakilan PP Muhammadiyah seluruh Indonesia. Dalam upacara tersebut mahasiswa Universitas Muhammadiyah pertama yang berjumlah 212 orang diperkenalkan kepada dosen dan hadirin. Dalam acara ini juga dilantik dan diresmikan para Presidium Universitas dan pimpinan Fakultas beserta dosen-dosennya sebagai berikut¹³⁸ :

- Pimpinan Fakultas Falsafah dan Hukum Muhammadiyah
 - Dekan Drs. Danuhusodo
 - Wakil Dekan Prof. Dr. Hamka (Kemudian dilanjutkan oleh Mr. Ezaddin, yang juga menjadi Sekretaris Universitas Andalas.)
- Dewan Kurator:
 - Ruslan Mulyo Harjo (Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Tengah)

¹³⁸ Hasan Ahmad *Loc. Cit.* lihat juga: Mahmud Junus. *Op. cit.* hlm. 242-243.

- Buya A.R. Sutan Mansyur (Ketua PP Muhammadiyah)
- Prof. H. Farid Ma'ruf
- H. Ilyas Ya'qub (Ketua DPRD I Sumatera Tengah)
- Sa'adudin Jambek.
- Dewan Pembina:
 - Ketua : H.A. Malik Ahmad
 - Wakil Ketua I : Suin Dt. Malintang Alam
 - Wakil Ketua II : R.I. Dt. Sinaro Panjang
 - Sekretaris I : Abdullah MS, SH
 - Sekretaris II : Hasan Ahmad

Dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari fakultas ini diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara otonom dibawah suatu pengurus yang terdiri dari bagian:

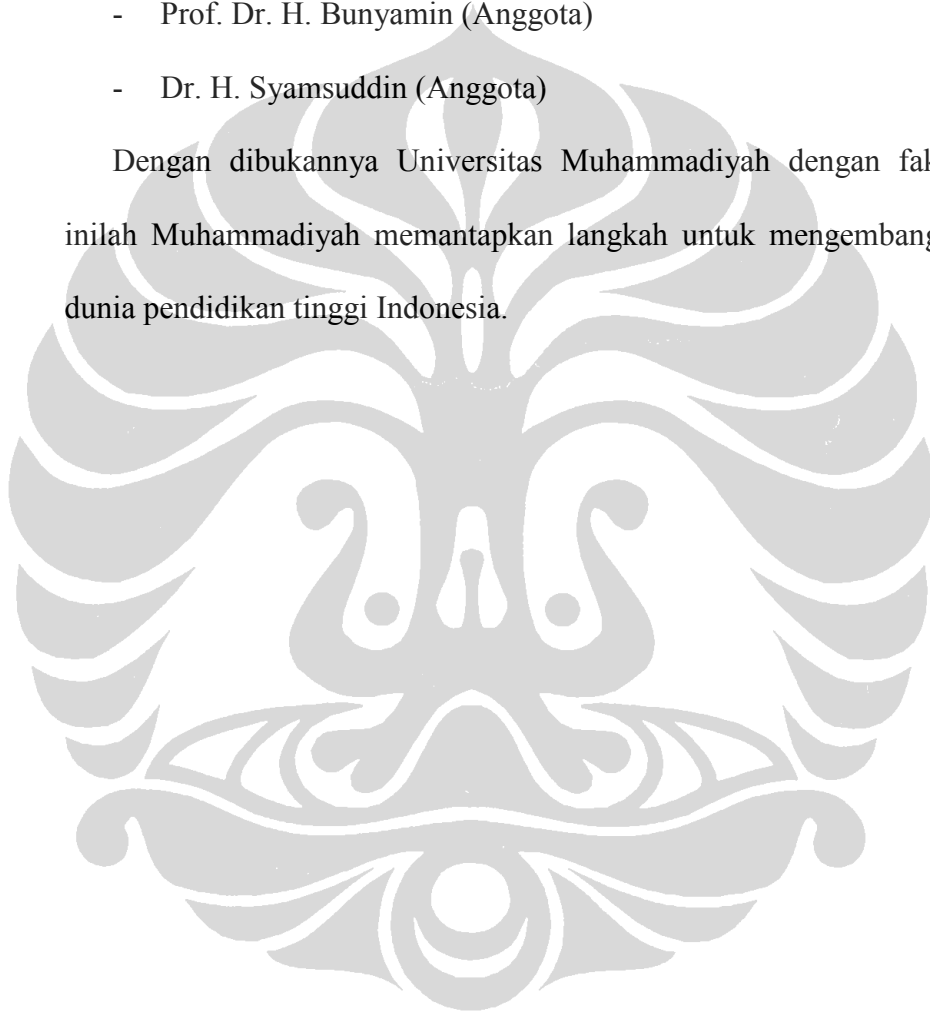
- Penyelenggara, yang bertanggung jawab dalam hal keuangan dan perlengkapan fakultas.
- Teknis, yang mengatur soal isi dan mutu kuliah.

Namun secara administratif fakultas tersebut berada di bawah suatu Universitas, dimana Universitas ini memiliki kewenangan untuk memilih *dewan kurator*, dosen-dosen. Universitas Muhammadiyah ini dipimpin oleh seorang Presiden Universitas yaitu Dr. H Ali Akbar dan dibantu oleh suatu Presidium yang beranggotakan¹³⁹:

¹³⁹ "Laporan Madjlis Pengadjaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah Niveau Konsulaat Seluruh Indonesia, pada tanggal 26 s/d 28 Djuli 1957 di Djakarta"

- Dr. H. Ali Akbar (Anggota merangkap Ketua)
- Prof. Dr. H. Rasyidi (Anggota merangkap Wakil Ketua)
- Prof. Dr. Hamka (Anggota)
- Prof. Dr. H. Bunyamin (Anggota)
- Dr. H. Syamsuddin (Anggota)

Dengan dibukannya Universitas Muhammadiyah dengan fakultas pertamanya inilah Muhammadiyah memantapkan langkah untuk mengembangkan kiprahnya di dunia pendidikan tinggi Indonesia.



(sumber: ANRI, no panggil: 1602), Presidium ini berpusat di Jakarta, badan ini kemudian menjadi koordinator untuk fakultas-fakultas Muhammadiyah yang berdiri kemudian.

BAB IV

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DI JAKARTA 1957-1965

Berdasarkan keputusan konferensi pengajaran Muhammadiyah yang diadakan pada tanggal 21 sampai 25 juli 1955 di Pekajangan, Pekalongan. pendidikan Muhammadiyah bertujuan untuk “membentuk manusia Muslim, berakhlaq mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna untuk masyarakat”¹⁴⁰. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya¹⁴¹.

Dalam kaitannya agar dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya itu, Muhammadiyah mengadakan bermacam-macam usaha seperti penyiaran agama, tabligh, memelihara tempat-tempat ibadah, mendirikan rumah-rumah untuk merawat orang sakit, rumah penyantunan anak yatim, dan usaha lain yang menunjang cita-cita perjuangan tersebut. Khususnya dalam hal pendidikan seperti yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah fasal 3 ayat b, tahun 1959 yang berbunyi “memajukan pendidikan dan pengajaran”¹⁴².

Hal ini telah dipraktekkan dengan mendirikan bermacam-macam Perguruan, Madrasah, ataupun Sekolah. dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sekolah-

¹⁴⁰ Perslah dari Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjelis Pengadjaran sekitar “Konferensi Pengadjaran Muhammadiyah Niveau Konsulaat 21-25 juli 1955 di Pekalongan (Musjawarat antara Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjelis Pengajaran dengan utusan-utusan dari Madjelis Perwakilan Daerah seluruh Indonesia)”. PP Muhammadiyah Madjelis Pengadjaran. Djakarta. 1955. Hlm.2

¹⁴¹ “Anggaran Dasar Muhammadiyah”. dalam *Almanak Muhammadiyah 1379*. PP Muhammadiyah Madjelis Taman Pustaka. Jakarta. 1959. hlm. 69.

¹⁴² *Ibid.* Hlm. 69-72.

sekolah yang telah dan akan didirikan adalah didasari atas niat untuk “Memajukan pendidikan dan pengajaran” yang sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.

Setiap perguruan Muhammadiyah menjadi bagian dari organisasi Muhammadiyah secara keseluruhan. Perguruan Muhammadiyah adalah suatu badan kesatuan yang mempunyai kekuatan dalam bertindak untuk kepentingan bersama jadi perguruan Muhammadiyah tidak hanya berdiri sendiri, dan tidak dapat bertindak dengan sendirinya tanpa memperhatikan kaidah-kaidah (aturan) yang berlaku sesuai dengan kepentingan organisasi¹⁴³.

Secara garis besar Muhammadiyah mempunyai dua macam corak perguruan. Pertama perguruan dengan bentuk, jenis dan corak seperti yang telah ada dalam system pengajaran pemerintah Indonesia dan kedua adalah yang mengikuti corak sesuai dengan kebutuhan Muhammadiyah sendiri. Dalam suatu siaran resmi Muhammadiyah, sampai pada berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Muhammadiyah di Jakarta jumlah keseluruhan lembaga pendidikannya di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut¹⁴⁴:

¹⁴³ Jusuf Abdullah Puar. “Pendidikan dan Perguruan Muhammadiyah”. Artikel dalam *Almanak Muhammadiyah 1379*. PP Muhammadiyah Madjlis Taman Pustaka. Jakarta. 1959. hlm. 73.

¹⁴⁴ Mahmud Yunus. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Mahmudiah. Djakarta. 1960. hlm. 234-235. lihat juga: Tim Penyusun. *Makin Lama Makin Tjinta- Muhammadiyah setengah abad* (kumpulan laporan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35). Deppen RI. Jakarta. 1963. Hal. 161-163. Daftar lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah ini termasuk beragam bentuk lain dari sekolah Muhammadiyah yang sudah disesuaikan atau disamakan dengan jenis sekolah/madrasah yang sesuai dengan system pengajaran pemerintah. Diantara sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tertua antara lain adalah: Kweekschool Muhammadiyah di Yogyakarta, Mu'allimin di Solo dan Jakarta, Mu'allimat di Yogyakarta, Zu'ama/Za'imat di Yogyakarta, Kulliyatul muballighien/muballighat di Padang Panjang, Tablighschool di Yogyakarta, H.I.K di Yogyakarta.

Tabel 6. Jumlah Lembaga Pendidikan Agama Muhammadiyah tahun 1957

No	Lembaga Pendidikan Agama Muhammadiyah	Jumlah
1	Madrasah Ibtidaiyah	412 buah.
2	Madrasah Tsanawiyah	40 buah
3	Madrasah Diniyah (Awaliyah)	82 buah
4	Madrasah Mu'allimin	73 buah
5	Madrasah Pendidikan Guru Agama (Muballighien)	75 buah
	Jumlah	682 buah

Tabel 7. Jumlah Lembaga Pendidikan Muhammadiyah lainnya tahun 1957

No	Lembaga pendidikan Muhammadiyah (Umum, Kejuruan dan lain-lain)	Jumlah
	Sekolah Rakyat	445 buah
	S.M.P	230 buah
	S.M.A	30 buah
	Sekolah Taman Kanak-kanak	66 buah
	S.G.B	69 buah
	S.G.A	16 buah
	Sekolah Kepandaian Putri	9 buah
	Sekolah Menengah Ekonomi Pertama	3 buah
	Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak	2 buah
	Sek. Menengah Ekonomi Atas	1 buah
	Sek. Guru Kepandaian Putri	1 buah
	Sek. Guru Pendidikan Jasmani	1 buah
	Sek. Pendidikan Kemasyarakatan	1 buah
	Sekolah Putri 'Aisyiah	1 buah
	Fakultas Hukum dan Filsafat (di Padangpanjang)	1 buah

	Perguruan Tinggi Pendidikan guru (di Jakarta)	1 buah
	Jumlah	877 buah

Maka secara keseluruhan jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki dan dikelola oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Madrasah	: 682 buah
2. Jumlah lembaga pendidikan lainnya	: 877 buah

Total keseluruhan	: 1559 buah ¹⁴⁵

Sekolah-sekolah Muhammadiyah ini dengan bermacam bentuk dan coraknya seperti telah disebut diatas bermaksud untuk “membentuk manusia Muslim”. Adapun “Muslim” yang ingin dibentuk itu (disamping segala keutamaan lainnya) secara khusus, adalah Muslim yang mempunyai sifat¹⁴⁶:

1. Berakhlaq mulia
2. Cakap (Jasmani dan Rohani).
3. Percaya pada diri sendiri
4. Berguna bagi masyarakat.

¹⁴⁵ Angka tersebut masih terdapat beberapa perbedaan, berdasarkan “laporan amal usaha” yang disampaikan oleh “Pusat Pimpinan Madjelis Pengadjaran” dalam konferensi pengajaran Muhammadiyah niveau konsulat tahun 1957, hal ini banyak yang disebabkan bahwa di beberapa tingkatan cabang atau ranting Muhammadiyah yang mempunyai sekolah, tidak atau belum melaporkannya, sehingga pendataan yang dilakukan tidak dapat dikatakan akurat 100% namun angka tersebut cukup untuk dijadikan acuan.

¹⁴⁶ “Perslah Konferensi Pengadjaran Muhammadiyah Niveau Konsulaat 21-25 juli 1955 di Pekadjaran, Pekalongan”

Lebih khusus lagi rumusan maksud dan tujuan sekolah tinggi bagi Muhammadiyah adalah memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan¹⁴⁷.

IV. 1 Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Universitas Muhammadiyah di Jakarta

Pendirian serta perkembangan PTPG Muhammadiyah di Jakarta memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Fakultas Falsafah dan Hukum Universitas Muhammadiyah di Kauman Padangpanjang. Bahkan dapat dikatakan secara tidak langsung Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta ini sebagai penerus cita-cita Universitas Muhammadiyah saat Fakultas yang berada di Padangpanjang tersebut akhirnya ditutup. Pemikiran yang ada pada organisasi Muhammadiyah mengenai jenjang pendidikan tinggi yang dimaksud pada awalnya adalah sebuah universitas yang bernaung dibawah organisasi Muhammadiyah maka dari itu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berada di Kauman, Padangpanjang disebut dengan ‘Fakultas’ yang pada waktu itu terdiri dari Fakultas Falsafah dan Hukum yang berada dibawah Universitas Muhammadiyah.

Dalam kaitannya dengan pendirian serta perkembangan PTPG Muhammadiyah yang merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah di Jakarta, adalah dengan terjadinya peristiwa konflik bersenjata antara Pemerintah Pusat

¹⁴⁷ Jusuf Abdullah Puar. *Loc. Cit.* hlm. 75.

Republik Indonesia dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada Tanggal 1 Mei 1958¹⁴⁸ kota Padangpanjang diduduki oleh tentara pemerintah pusat, yang mengakibatkan untuk kedua kalinya Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang dengan perguruan tingginya disana yang baru berumur tiga tahun harus ditinggalkan dengan terpaksa. Walaupun pada akhirnya pergolakan itu diakhiri dengan perdamaian antara pemerintah pusat dengan PRRI pada bulan Agustus 1961¹⁴⁹. Para pejuang PRRI sudah kembali ke kota, namun Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang hancur berantakan dan sebagian gedungnya diduduki oleh tentara pusat, dimana semua peralatan, sarana dan prasarana pendidikan lainnya seperti mobil, perpustakaan dan sebagainya sudah dirampas oleh tentara pusat dan oknum PKI¹⁵⁰.

Kompleks perguruan ini belum bisa dibangun kembali dalam waktu singkat. Pembangunan kembalinya dilakukan secara bertahap, dimulai lebih dulu dengan pembukaan kembali SD Muhammadiyah lalu *Madrasah Tsanawiyah* Muhammadiyah dan mengenai Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berada di Kompleks tersebut baru dapat dibuka kembali lama kemudian dengan bentuknya yang baru dan bukan

¹⁴⁸ H. Hasan Ahmad. "Dinamika Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang (2)". Artikel dalam *Suara Muhammadiyah* no.17. 1-15 September 2006. Hlm 28-29. peristiwa pertama yang mengakibatkan kompleks perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang ini harus ditinggalkan adalah sewaktu terjadi Agresi Militer Belanda kedua pada tahun 1948 dimana kota Padangpanjang diduduki oleh Belanda sehingga kompleks perguruan tersebut harus ditinggalkan oleh seluruh pimpinan, guru dan pelajar yang bergerilya melawan Belanda di luar kota.

¹⁴⁹ Dalam penyelesaian akhir konflik ini banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah Sumatera barat yang ikut ditangkap begitu juga sebagian orang yang kebetulan juga menjadi tenaga pengajar dari perguruan Muhammadiyah di Kauman, Padangpanjang tersebut. Ulasan mengenai PRRI tersebut lihat: Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional (Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965)*. Mizan. Bandung. 2000. Hlm. 446.

¹⁵⁰ Hasan Ahmad. *Loc. Cit.* Hlm. 29

sebagai kelanjutan Fakultas Falsafah dan Hukum dari Universitas Muhammadiyah yakni pada tanggal 1 september 1964 dengan diresmikannya pendirian *Akademi Kulliyatul Muballighien* yang pada perkembangannya kemudian menjadi Jurusan Dakwah, Fakultas Ilmu Agama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB)¹⁵¹. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Fakultas Falsafah dan Hukum sebagai Fakultas pertama dari Universitas Muhammadiyah yang berada di Kauman, Padangpanjang praktis telah berhenti beroperasi semenjak peristiwa PRRI tersebut¹⁵².

Gagasan mengenai Universitas Muhammadiyah pertama kali diamanahkan dalam Congress (Muktamar) Muhammadiyah yang ke-25 tahun 1936 di Batavia dan mengalami penundaan yang lama karena pecahnya perang dunia II lalu kembali diamanahkan dan ditegaskan melalui Muktamar Muhammadiyah yang ke-33 tahun 1956 di Palembang¹⁵³, itu pun terancam kembali hilang sebagaimana yang terjadi sebelumnya, hal ini berhubung pada waktu itu memang Universitas Muhammadiyah yang dimaksud baru hanya memiliki Fakultas Falsafah dan Hukum yang berada di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang sedangkan di daerah tersebut terjadi pergolakan PRRI, maka untuk menyelamatkan cita-cita Universitas Muhammadiyah ini didirikanlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta dengan

¹⁵¹ PP Muhammadiyah. *Direktori PTM –Profil Universitas, Sekolah Tinggi, Politeknik & Akademi Muhammadiyah Se Indonesia*. Majelis Diktilitbang. PP Muhammadiyah. Yogyakarta. 2006. Hlm. 47.

¹⁵² Wawancara dengan Drs. H. Husni Thoyar M.Ag. (63 Tahun), di Ciputat, Tangerang, 11 Mei 2008. pukul 10.00 wib

¹⁵³ “Tjatatatan Singkat Mu’tamar Muhammadiyah ke 33 di Palembang pada 24-29 Djuli 1956” (sumber: ANRI, no panggil: 925).

nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG)¹⁵⁴ yang merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah dan mengambil tempat di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Limau, Jakarta Selatan. Kompleks ini memiliki beberapa kemiripan dengan Kompleks Perguruan Muhammadiyah di Kauman Padangpanjang.

IV. 1. 2 Muhammadiyah Cabang Kebayoran Baru

Sebelumnya perlu diketahui bahwa Muhammadiyah telah membuka cabang di Jakarta sejak tahun 1921 kemudian berkembang menjadi satuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PMD), lalu dari tingkat Pimpinan Daerah ini didirikanlah beberapa cabang sampai dengan tahun 1957 yang antara lain adalah¹⁵⁵:

tabel 8. Perkembangan Muhammadiyah cabang Jakarta.

No	Nama Cabang	Tahun Pendirian	S.K PP No:	Jumlah Ranting
1.	Tanah Abang	1952	10 BA (1 Juli 1952)	6 ranting
2.	Bendungan	1956	1243/A (1 November 1956)	1 ranting
3.	Kebayoran Baru	1955	1149/A (15 November 1955)	5 ranting
4.	Tanjung Grogol	1957	1322/A (15 Agustus 1957)	3 ranting

¹⁵⁴ Wawancara dengan Drs. H. Husni Thoyar M.Ag. (63 Tahun), di Ciputat, Tangerang, 11 Mei 2008. pukul 10..00 wib.

¹⁵⁵ “Laporan Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD): Djakarta Raja”, Tahun: 1958. (sumber: ANRI, no. panggil: 1788)

Dalam perkembangannya, gerak langkah Muhammadiyah khususnya cabang Kebayoran Baru, terus bergerak disesuaikan dengan iklim dan suasana daerah tersebut yang pada waktu itu dikenal sebagai kota baru yang sedang berkembang. Jalan menuju arah peresmian cabang Kebayoran baru ini sebenarnya telah dimulai pada tahun 1952 sampai dengan 1955 dimana lebih dikenal sebagai periode ‘menanam’ dan gerakannya yang lebih bersifat pelan-pelan. Pada periode pembentukan ini sering diadakan konsolidasi dari kalangan tenaga-tenaga lama yang tempat tinggalnya terpencar-pencar dan juga terdiri dari berbagai kalangan masyarakat serta latar belakang etnis dan kebudayaan yang berbeda, ini pula salah satu keistimewaan Muhammadiyah di Kebayoran waktu itu. Banyak operasi gerakan Muhammadiyah waktu itu dilakukan dengan nama masing-masing latar belakang kebudayaan tersebut seperti operasi ala rendang, ala bengawan, ala rentjong, mandau, karapan, dsb¹⁵⁶. Umumnya masyarakat ramai belum banyak tahu mengenai organisasi Muhammadiyah pada waktu itu di daerah itu, lalu berbagai cara lain juga dilakukan untuk memanggil ummat, menggembirakan beramal dan mensyiarkan agama Islam seperti :

- Mengadakan perayaan meriah pada saat isra mi'raj
- Mengadakan pameran hasil seni, perlombaan pemuda & pelajar
- Pemutaran film untuk anak-anak

¹⁵⁶Laporan “Amal Usaha Muhammadiyah –Tjabang Kebayoran Baru”. Muhammadiyah Tjabang Kebayoran Baru. Jakarta. 1958. Hlm. 14-15.

- Mengundang fakir miskin dan yatim piatu pada saat hari raya besar Idul Fitri dan Idul Adha
- Mengadakan gerakan mengurus kematian
- Menggelar shalat Ied Hari Raya secara besar di lapangan terbuka, serta lain-lain sebagainya yang bersifat Tabligh.

Saat gerakan Muhammadiyah didaerah tersebut dirasa sudah cukup mapan maka diresmikanlah Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kebayoran Baru, lalu atas usaha pimpinan cabang telah berhasil diperoleh sebuah gudang yang luasnya kurang lebih 500 m per segi yang berdiri di sebidang tanah seluas 1000 m per segi. Gudang ini kemudian dirubah menjadi gedung persekolahan dengan biaya kurang lebih Rp 35.000 dan diresmikan pada bulan Juni 1956, dengan suatu upacara sederhana yang dihadiri oleh ketua umum PP Muhammadiyah. Gedung tersebut dapat menampung¹⁵⁷:

- 6 Kelas SMP petang
- 5 Kelas SMA pagi
- 1 Kelas Taman kanak-kanak
- 2 kelas untuk pengajian dan rapat

Dalam perkembangan berikutnya penambahan serta perluasan gedung-gedung yang dipakai untuk aktifitas pendidikan dan pengajaran terus diupayakan secara bertahap, disamping juga penambahan ragam aktifitas pendidikan dan pengajaran itu sendiri, dan dalam lustrum I perguruan Muhammadiyah cabang Kebayoran Baru telah terdiri dari: SMP (petang), SMP Puteri (pagi), SMA bagian A dan C (pagi) dan PGA

¹⁵⁷ *Ibid.* hlm. 16. lihat lampiran 6 (Gambar No. 8)

Muallimien (petang)¹⁵⁸. Yang kesemuanya berada pada Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kebayoran Baru.

Dapat dilihat bahwa hampir serupa dengan Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kauman Padangpanjang, dimana di dalam satu kawasan terdapat beberapa aktifitas dan lembaga pendidikan Muhammadiyah maka gagasan untuk pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah pun diputuskan untuk didirikan di tempat ini karena memang dinilai sebagai tempat yang paling kondusif¹⁵⁹.

IV. 1. 3 Pendirian PTPG Muhammadiyah Jakarta

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa fakultas pertama dari Universitas Muhammadiyah yang berada di Sumatera Tengah (sekarang Sumatera Barat) harus ditutup dengan beberapa alasan seperti yang sudah disebutkan diatas maka untuk terus menjaga kelangsungan cita-cita Universitas Muhammadiyah ini perlu diadakan beberapa tindakan penyelamatan yaitu dengan didirikannya suatu Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta yang merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah. Namun disamping apa yang terjadi dengan Fakultas Falsafah dan Hukum, gagasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta juga sebenarnya

¹⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 22-24.

¹⁵⁹ Berdasarkan “Rentjana Kerdja Pelaksanaan Langkah Muhammadiyah Dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan periode 1959-1962” (sumber: ANRI, no panggil: 3824) Perguruan Muhammadiyah di Komplek Jalan Limau Kebayoran Baru Jakarta merupakan ‘Pilot Project’ teladan, dimana pada satu kompleks itu terdapat sekolah Taman kanak-kanak, S.R., SMP, SMA dan FKIP Muhammadiyah (perubahan nama dari PTPG Muhammadiyah) dengan sebuah Mesjid di tengah-tengahnya.

merupakan suatu gagasan yang didorong akan kebutuhan untuk mendirikan suatu perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran yang pada akhirnya dapat menghasilkan tenaga pendidik yang bermutu dan berkualifikasi sarjana (berijazah pendidikan tinggi).

Hal ini juga merupakan salah satu keputusan dari Konferensi Pengajaran Muhammadiyah Seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 s/d 28 Juli 1957¹⁶⁰. dimana pada suatu pernyataan “press release-nya” pada poin ke-4 dinyatakan sebagai berikut:

“Diantara amanat konperensi kepada Madjelis Pengadjaran Muhammadiyah adalah:

A. – Usaha Kedalam:

Agar Madjelis Pengadjaran Muhammadiyah Pusat memperkuat susunan Presidium Universitas Muhammadiyah sehingga pembukaan fakultas-fakultasnja di Djakarta dan Makassar sebagai tambahan fakultasnja jang telah ada di Padangpandjang dapat dilaksanakan tahun ini djuga.”

Berdasarkan pernyataan dari PP Muhammadiyah tersebut dapat dilihat bahwa masalah mengenai Universitas Muhammadiyah ini merupakan salah satu bahasan utama dari Majelis Pengajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan wacana yang ada pada waktu itu adalah untuk memperkuat Universitas Muhammadiyah ini dengan pembukaan fakultas-fakultas baru di beberapa tempat lain namun demikian

¹⁶⁰ “Press Release –Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah seluruh Indonesia, di Djakarta” . 1957. (sumber: ANRI no. panggil: 1602)

pembukaan fakultas yang berada di Makassar, seperti yang disebutkan dalam kutipan salah satu keputusan konferensi, tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dari apa yang sudah ditentukan saat konferensi tersebut. Oleh karena itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk panitia yang dikenal dengan nama panitia Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah panitia itu terdiri dari¹⁶¹

- Arso Sosroatmodjo (ketua)
- H. S Prodjokusumo (sekretaris)
- Semangun (anggota)
- Asnawi (anggota)
- H. Ghozali Doenia (anggota)
- Doeraini (anggota)
- Soeroto Karto Soedarmo (anggota)

Panitia ini diberi tugas sesuai dengan namanya untuk mendirikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang pada akhirnya diputuskan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Muhammadiyah di Jakarta sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah, panitia ini juga dibantu oleh Majelis Pengajaran Muhammadiyah antara lain dengan cara mengeluarkan kupon bakti murid-murid atau anggota Muhammadiyah seluruh Indonesia dengan maksud menyumbang secara materi untuk penyempurnaan pembangunan Universitas Muhammadiyah yang

¹⁶¹ Tim Penulis. *50 Tahun Uhamka –Turut Mencerahkan Peradaban Bangsa 1957-2007*. UHAMKA Press. Jakarta. 2007. Hlm. 199.

termasuk di dalamnya waktu itu Fakultas Falsafah dan Hukum di Padang Panjang yang masih berjalan dan PTPG yang akan didirikan di Jakarta ini¹⁶².

Setelah bekerja keras beberapa lama, panitia tersebut berhasil mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Muhammadiyah yang merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah, Untuk pertama kali PTPG ini membuka Jurusan Ilmu Mendidik (pendidikan), dengan kurikulum yang berorientasi pada PTPG Negeri¹⁶³, yang berlokasi di jalan Limau II, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Perguruan Tinggi tersebut diresmikan dengan Piagam Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 25 rabiul awal 1377 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1957 M¹⁶⁴. Pada awal berdirinya PTPG mempunyai satu jurusan, yaitu jurusan ilmu mendidik, dengan mahasiswa sebanyak hanya 17 orang dan tenaga pengajar yang hanya berjumlah 7 orang yang terdiri dari¹⁶⁵:

1. H. Mubangid Rono Handoyo..... Dekan
2. H. Bustam A. GaniDosen luar biasa
3. H. M Nur AsjikDosen luar biasa
4. Mr. Suroto Dosen

¹⁶² “Laporan Panitia Ketjil mengenai usul-usul Konperensi Pengadjaran Muhammadiyah Niveau Consulaat di Jakarta 1957”. Hlm 2, poin ke-7.

¹⁶³ Forum interaktif UMJ, Admin. Subyek: “Sejarah UMJ”. <http://www.umj.ac.id> (30 april 2007; pkl 17.00).

¹⁶⁴ Berdasarkan temuan-temuan yang ada bahwa saat Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) didirikan ternyata Fakultas Falsafah dan Hukum di Padangpanjang yang merupakan fakultas awal Universitas Muhammadiyah, belumlah sepenuhnya ditutup karena baru sampai pada puncak ketegangan PRRI di daerah tersebut kemudian Fakultas tersebut ditutup yakni pada tanggal 1 mei 1958, sedangkan peresmian PTPG ini terjadi pada tanggal 18 november 1957, maka dengan demikian PTPG merupakan salah satu bagian dari Universitas Muhammadiyah.

¹⁶⁵ Mahmud Yuus. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Mahmudiah. Djakarta. 1960. hlm. 243-245.

5. Drs. DanuhusodoDosen
6. Ghazali Dosen
7. SugengDosen

Salah satu alasan utama untuk mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) adalah karena memang hal ini sesuai dengan jiwa Muhammadiyah yang menaruh perhatian amat besar di bidang pendidikan namun belum memiliki jenjang pendidikan tinggi di bidang ilmu pendidikan dan karena *nomenclature* pada waktu itu untuk jenjang pendidikan tinggi di bidang ilmu pendidikan adalah PTPG maka diputuskanlah untuk mendirikan PTPG Muhammadiyah di Jakarta tersebut¹⁶⁶.

Pada saat Muhammadiyah mendirikan PTPG di Kebayoran Baru Jakarta ini, tercatat bahwa di Indonesia baru ada dua PTPG swasta, yakni Sanata Dharma (Katolik) di Yogyakarta, dan Satyawacana (Kristen) di Salatiga. Adapun PTPG negeri yang ada adalah PTPG Bandung, Bukit Tinggi dan beberapa tempat lainnya. Di luar PTPG banyak terdapat kursus B-1 dan PGLSP berbagai jurusan. Salah satu kursus B-1 swasta yang terkenal adalah B-1 Saraswati Solo¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Prof. Dr. Hadjid Harnawidagda, M.Pd. (70 Tahun), di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 juni 2008. pukul 09.30 wi b

¹⁶⁷ *Ibid.* lihat juga: R.H. Asnawi Hadisiswaja. *Laporan Menjusun Rangka-Rangka untuk menjelenggarakan Akademy Tabligh* . “Laporan persiapan Akademy Tabligh Jogjakarta”. 1957. Hlm.3. (Sumber: Arsip Nasional Republik Indoensia, no panggil: 2453)

IV.2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah

Pada masa awal berdirinya PTPG ini, boleh dikatakan keadaan sangatlah memprihatinkan, ibaratnya “hidup enggan mati tak mau”. Sebabnya adalah jumlah mahasiswanya sangat sedikit, dan uang masuknya sama sekali tidak memadai untuk menunjang biaya operasional suatu perguruan tinggi, bahkan PTPG yang merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah ini sempat dianggap hampir “mati”¹⁶⁸.

Seperti disebutkan sebelumnya jumlah mahasiswa pada masa awal pendirian PTPG Muhammadiyah ini hanya terdapat 17 orang dan hanya ada satu fakultas. Mahasiswa-mahasiswa awalnya pun kebanyakan terdiri dari guru-guru sekolah yang secara ekonomi tidak terlalu mendukung ditambah memang pada waktu itu suasana perekonomian secara nasional tidak terlalu mendukung pula.

Hal ini ditambahkan oleh salah satu narasumber yang mengatakan bahwa pada tahun itu semua orang dalam keadaan lapar¹⁶⁹, sehingga dapat dimengerti betapa sulitnya untuk memperoleh pembiayaan yang cukup apabila hanya mengandalkan pemasukkan dari mahasiswanya. Ini adalah kondisi awal yang dihadapi oleh Muhammadiyah demi melaksanakan amanah dan cita-cita lamanya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang telah diembankan berdasarkan hasil konferensi-konferensi dan muktamar yang lalu.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Prof. Dr. Hadjid Harnawidagda, M.Pd. (70 Tahun), di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 juni 2008. pukul 09.30 wi b

¹⁶⁹ *Ibid.*

IV. 2. 2 Kerja Sama Dengan Jawatan Pendidikan Agama (Djapenda)

Melihat keadaan tersebut para Pimpinan Majelis Pengajaran PP Muhammadiyah yang saat itu diketuai oleh Bapak Sardjono, dan di dalamnya antara lain termasuk Arso Sosroatmodjo yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Jawatan Pendidikan Agama (Djapenda) mengupayakan kerja sama dengan Departemen Agama melalui Djapenda tersebut¹⁷⁰, berkat lobby dan kerjasama ini PTPG kemudian mendapat bantuan yang sangat menolong dari Departemen Agama melalui kerjasama yang dibangun oleh kedua belah pihak.

Kerja sama tersebut dapat terjalin dengan melihat kenyataan yang ada pada waktu itu dimana banyak pegawai Departemen Agama yang mengambil inisiatif sendiri untuk berkuliah di PTPG dan B-1 atau Perguruan Tinggi lain untuk memperoleh gelar sarjana tanpa izin dan di luar kontrol Departemen Agama. Disamping juga karena memang pada waktu itu Departemen Agama memerlukan guru-guru mata pelajaran umum sedangkan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang sudah dimiliki Departemen Agama baru memiliki jurusan-jurusan ilmu agama, Melihat kondisi ini muncul gagasan yang diusulkan oleh para pengelola PTPG Muhammadiyah ini kepada pemerintah, bahwa bagaimana kalau tamatan Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA), tamatan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) dan Pendidikan Guru Agama (PGA) yang sudah menjadi pegawai dan kebetulan

¹⁷⁰ Wawancara dengan Drs. H. Husni Thoyar M.Ag. (63 Tahun), di Ciputat, Tangerang, 11 Mei 2008. pukul 10..00 wib. Lihat juga: "Laporan hasil pemeriksaan pembukuan Keuangan Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Pengadjaran Djakarta" tertanggal 22 juli 1959, Jakarta. (Sumber: Arsip Nasional RI No. panggil 750.)

mempunyai ijazah setara dengan sekolah menengah atas (SMA), dipanggil dan diberi tugas belajar di ADIA Jakarta, administrasinya disatukan dengan mahasiswa Jakarta, tetapi belajarnya dititipkan di PTPG Muhammadiyah¹⁷¹.

Bapak Arifin Temyang sebagai kepala Djapenda menyetujui ini dan kebetulan juga Kyai Ilyas selaku Menteri Agama pada waktu itu tidak keberatan¹⁷². Maka direalisasikan lah persetujuan ini. Departemen Agama memberikan sejumlah bantuan uang kepada Muhammadiyah untuk membangun gedung tingkat dua pada lahan Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kebayoran Baru, yang terletak di jalan Limau. Unit gedung baru itu untuk sementara juga digunakan oleh Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA)¹⁷³ di bawah pimpinan bapak Mahmud Yunus.

Bentuk kerjasama ini direalisir dengan dibuatnya surat perjanjian antara kedua belah pihak dimana Djapenda bersedia menyediakan sejumlah uang tertentu kepada Muhammadiyah, dengan syarat bahwa uang itu harus dipergunakan untuk mendirikan gedung perguruan dan keperluan operasional untuk perguruan yang dimaksud, dimana gedung itu diikat dengan ketentuan sebagai berikut¹⁷⁴:

- a. Gedung itu setelah selesai, mutlak menjadi milik Muhammadiyah.
- b. Djapenda berhak menempati gedung itu untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikannya, dengan cara menyewa, yang jumlah

¹⁷¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Hadjid Harnawidagda, M.Pd. (70 Tahun), di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 juni 2008. pukul 09.30 wi b

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Booklet Laporan “Amal Usaha Muhammadiyah –Tjabang Kebayoran Baru”. Muhammadiyah cab. Kebayoran Baru. Jakarta. 1958. Hlm. 68. lihat lampiran 6 (Gambar No. 9)

¹⁷⁴“Laporan amal usaha Madjlis Pengadjaran Pusat” yang disampaikan dalam ‘Konferensi Pengadjaran Muhammadiyah niveau Konsulat seluruh Indonesia’ yang diadakan di Jakarta pada 26-28 Juli 1957.

sewanya setiap bulan ditentukan oleh pemerintah melalui *Djawatan Gedung Negeri*.

- c. Selama gedung itu dipakai Djapenda, uang sewanya hanya bisa dipergunakan untuk perbaikan dan atau penambahan gedung tersebut.
- d. Muhammadiyah dapat memakai sebagian atau seluruh gedung itu bilamana tidak dipergunakan oleh Djapenda.

Kerjasama yang terjalin antara Muhammadiyah dan Jawatan Pendidikan Agama (Djapenda) ini sudah terjalin cukup lama dan baik, berdasarkan laporan resmi pada tahun 1957 hubungan kerja sama antara Muhammadiyah dengan Djapenda antara lain adalah keanggotaan Muhammadiyah dalam suatu panitia yang dibentuk oleh Djapenda yang bernama Majelis Pertimbangan, Pendidikan dan Pengajaran Agama atau MP3A, dimana tidak sedikit dari ide-ide Muhammadiyah mengenai pendidikan agama yang berhasil diterima di dalamnya. Muhammadiyah juga telah lama menjalin kerja sama dalam soal tukar menukar tenaga guru untuk sekolah-sekolahnya maupun untuk sekolah-sekolah milik Kementerian Agama¹⁷⁵.

Mengenai kerjasama antara Muhammadiyah dengan Djapenda di bidang pembangunan gedung-gedung sekolah, sebenarnya semenjak tahun 1954 Djapenda telah mengambil kebijaksanaan tertentu dalam membagi bantuan bagi Madrasah-

¹⁷⁵ *Ibid.* Laporan Madjlis Pengadjaran Muhammadiyah Pusat. Hlm 7-8.

Madrasah sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan melalui pusat-pusat organisasinya, dan Muhammadiyah adalah salah satu dari penerima bantuan tersebut.

IV. 2. 3 Dari PTPG Menjadi FKIP Universitas Muhammadiyah

PTPG merupakan bentuk lanjutan pendidikan guru pada jenjang pendidikan tinggi yang pertama kali diupayakan oleh *Djawatan Pengadjaran* Kementerian PP & K pada tahun 1954 dimana Malang dan Bandung sebagai tempat pertama kali dibukanya. Pada tahun 1957, berdasarkan kebijakan pemerintah PTPG ini berubah namanya menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang menginduk kepada universitas negeri setempat, seperti PTPG Bandung yang menjadi fakultas KIP dari Universitas Padjajaran, Bandung¹⁷⁶.

Hal ini juga terjadi dengan PTPG Muhammadiyah yang merubah namanya menjadi FKIP di bawah kepemimpinan bapak Sa'adoedin Djambek. FKIP tersebut tetap merupakan salah satu fakultas dari Universitas Muhammadiyah, hal ini tepatnya terjadi setahun setelah pendirian PTPG Muhammadiyah yakni pada tahun 1958 bersamaan dengan dimulainya kerja sama dengan Djapenda Kementerian Agama.

Maka dimulailah perkuliahan FKIP Muhammadiyah, dengan dipimpin oleh seorang dosen senior dari PTPG Bandung yang ditugaskan kepada Departemen Agama untuk menunjang proyek kerja sama yang telah dijelaskan sebelumnya. Dosen tersebut adalah Bapak Saadoe'din Djambek yang kebetulan juga merupakan aktivis

¹⁷⁶ Helius Syamsuddin, dkk. Anhar Gonggong (edt). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Depdikbud Dirjen Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta. 1993. Hlm. 62-63.

Muhammadiyah dan sebelumnya pernah menjadi anggota dewan kurator Fakultas Falsafah dan Hukum Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang. Ia dibantu pula oleh seorang asisten yang kebetulan juga pegawai Departemen Agama yang sudah berhasil lulus sarjana muda di PTPG negeri yaitu bapak Sudarno.

Selanjutnya pada tahun 1959 FKIP ini mengalami perkembangan dengan dibukanya dua jurusan baru, sehingga FKIP Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki tiga jurusan, masing-masing jurusan dengan ketuanya sebagai berikut¹⁷⁷:

1. Jurusan Ilmu mendidik, dipimpin oleh Prof. R. Soegarda Poerbakawatja.
2. Jurusan Bahasa Indonesia, dipimpin oleh Abbas Sutan Pamuntjak Nan Sati.
3. Jurusan Bahasa Inggris, dipimpin oleh G.B Pasaribu.

* Adapun susunan personalia selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Dekan : Moebangid Ronohandoyo
2. Ketua Jurusan Ilmu Mendidik : Prof. R. Soegarda Poerbakawatja.
3. Ketua Jurusan Bahasa Indonesia : Abbas Pamuntjak Sutan Nan Sati
4. Ketua Jurusan Bahasa Inggris : G.B Pasaribu

* sedangkan dosen-dosennya adalah:

¹⁷⁷ Tim Penulis. *50 Tahun Uhamka –Turut Mencerahkan Peradaban Bangsa 1957-2007*. UHAMKA Press. Jakarta. 2007. Hlm. 199.

I. Jasin, M.A.; Drs. K.R.T. Donohoesodo; Soeroto Kartosoedarmo; H. Gozali Doenia; T. Pramono; Gazali, M.A; Soeparmo; Almatsir; Drs. R. Moh. Ali; T. Soebroto; R. Soegeng Soedaryono; Zoeber Usman; Radjabab, M.A.; H. Boestamin A. Gani; H. Mahmud Yunus; Dr. Moekti Ali.

Dapat dikatakan bahwa kerja sama dengan Djapenda ini sangatlah strategis karena disamping bantuan dana dan bantuan infrastruktur fisik, tambahan jumlah mahasiswa yang mendapat tugas belajar (*studie opdracht*) dari Departemen Agama adalah yang membuat kegiatan perkuliahan dapat berjalan.

Mahasiswa yang mendapat tugas belajar tersebut umumnya adalah guru pada sekolah-sekolah binaan departemen agama seperti madrasah atau PGA yang berada di daerah-daerah di Indonesia yang mengajarkan mata pelajaran umum namun belum mempunyai gelar sarjana, jadi proyek ini juga sebagai suatu upaya Depag pada waktu itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Lalu pada tahun berikutnya, kepercayaan itu masih diberikan lagi oleh Jawatan Pendidikan Agama, sehingga jumlah mahasiswa bertambah lagi¹⁷⁸.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Drs. H. Husni Thoyar M.Ag. (63 Tahun), di Ciputat, Tangerang, 11 Mei 2008. pukul 10.00 wib.

IV. 3 Universitas Muhammadiyah -Menuju Desentralisasi Pendidikan Tinggi Muhammadiyah

Dalam perjalanan selanjutnya Universitas Muhammadiyah yang berbasis di Jakarta ini membuka fakultas baru. Pada tanggal 21 September 1961 dibuka Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) yang diprakarsai oleh Bapak Mulyadi Djojomartono yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dan beliau juga merupakan salah satu anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelum diangkat oleh pemerintahan Presiden Soekarno sebagai salah satu menterinya. Dekan pertama FKS dipercayakan kepada Prof. Mr. H. Sumantri Praptokusumo yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI¹⁷⁹.

Fakultas Kesejahteraan Sosial dari Universitas Muhammadiyah ini lantas berlokasi di tempat yang sama dengan FKIP Muhammadiyah Jakarta yaitu di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Kebayoran Baru yang terletak di jalan Limau. Dalam perjalanan selanjutnya, setelah berdiri Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ia kemudian berkembang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dari UMJ tersebut.

Dinamika serta perkembangan dari FKS ini memang tidak dibahas secara mendalam karena peranannya yang kurang sentral dalam perintisan awal usaha Muhammadiyah dengan Universitasnya. FKS ini hanyalah sebagai pelengkap dari Universitas Muhammadiyah yang ada pada waktu itu, sehingga agak sulit untuk

¹⁷⁹ Forum interaktif UMJ, Admin. Subyek: "Sejarah UMJ". <http://www.umj.ac.id> (30 april 2007; pkl 17.00)

menggambarkan usaha perintisan Muhammadiyah dengan Universitasnya melalui perkembangan FKS tersebut karena memang tidak banyak yang terjadi dengan FKS ini.

Sementara itu, pada FKIP Muhammadiyah Jakarta mahasiswa titipan Departemen Agama yang diberi tugas belajar hanya berjalan dua angkatan. Yakni, angkatan tahun 1958 yang berjumlah 50 orang. Sedangkan angkatan keduanya tahun 1959 berjumlah 22 orang. Adapun mahasiswa non tugas belajar adalah mahasiswa awal PTPG Muhammadiyah itu sendiri ditambah beberapa orang yang jumlahnya tidak sampai 40 orang. Dan memasuki tahun ketiga, tahun 1960, sudah tidak ada mahasiswa tugas belajar lagi, karena Departemen Agama sudah membuka jurusan-jurusan pendidikan umum, di lingkungan IAIN yang waktu itu masih berpusat di Yogyakarta dan Jakarta sebagai cabang¹⁸⁰. Dan sampai pada tahun 1961 FKIP Muhammadiyah Jakarta ini baru bisa mengadakan wisudanya yang pertama dengan 37 orang alumni¹⁸¹.

Dengan berakhirnya kerja sama dengan Djapenda maka berarti Muhammadiyah kembali harus mengelola FKIP-nya yang berada di Jakarta secara mandiri. Ini berarti FKIP Muhammadiyah Jakarta harus mencari sumber dana baru, hal ini nampaknya menjadi kendala yang cukup besar karena ternyata FKIP Muhammadiyah tidak mampu untuk menopang dirinya sendiri. Maka dari itu bapak

¹⁸⁰ Wawancara dengan Drs. H. Husni Thoyar M.Ag. . (63 Tahun), di Ciputat, Tangerang, 11 Mei 2008. pukul 10..00 wib.

¹⁸¹ "Grafik Mahasiswa dan Alumni IKIP Muhammadiyah Jakarta tahun 1957-1965". IKIP Muhammadiyah Jakarta. 1986. lihat grafik (lampiran 10)

Saadoe'ddin Djambek selaku dekannya, menon-aktifkan FKIP ini untuk waktu yang tidak ditentukan lalu mahasiswanya dipersilahkan untuk pindah ke FKIP Negeri Jakarta, Bandung atau ke IAIN¹⁸².

Keadaan FKIP Muhammadiyah yang seperti itu tentu saja sangat mengecewakan pimpinan Muhammadiyah. Maka kemudian dicari siapa diantara orang-orang Muhammadiyah yang kebetulan dosen FKIP Negeri atau IAIN yang bersedia bekerja keras dalam keterbatasan dana untuk menghidupkan FKIP Muhammadiyah. Lalu terpilihlah AS Broto, Maftuhah Yusuf dan kawan-kawan. Dengan tekad yang kuat walau dengan dana yang terbatas mereka menghidupkan kembali FKIP berdasarkan pengalaman menyelenggarakan pendidikan tinggi sebelumnya. Akhirnya dengan usaha yang keras dan penuh keikhlasan dalam bekerja, FKIP Universitas Muhammadiyah di Jakarta ini dapat mempertahankan keberadaannya dan tidak perlu ditutup. Bahkan kemudian dalam perjalanannya dapat mengembangkan dirinya¹⁸³. Kepemimpinan pun diteruskan oleh Mr. Soeroto Kartosoedarmo yang menggantikan Bapak Djambek, namun tidak berlangsung lama yaitu dalam waktu kurang dari setahun.

Lalu Bapak A.S Broto yang kemudian meneruskan kepemimpinan FKIP dari Mr. Soeroto Kartosoedarmo. Di bawah kepemimpinannya perkembangan dapat terus dilakukan yakni pada tahun 1963 dengan membuka kelas baru di Jln Kramat Raya 49 Jakarta Pusat, untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial (FKIS). Hal menarik dalam

¹⁸² Wawancara dengan Bapak Ambar Wiyadi (68 Tahun), di Cilacap, Jawa tengah, 20 maret 2007.

¹⁸³ Wawancara dengan Prof. Dr. Hadjid Harnawidagda, M.Pd. (70 Tahun), di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 juni 2008. pukul 09.30 wi b

perkembangan FKIS tersebut adalah dalam perjalanannya kemudian, dimana jurusan yang pernah menjadi favorit di FKIS tersebut merupakan jurusan Sejarah, dengan jumlah mahasiswanya yang mencapai 16 kelas dan merupakan angka tertinggi dibandingkan jurusan-jurusan lain yang ada pada waktu itu¹⁸⁴.

Dalam perkembangannya kemudian Universitas Muhammadiyah yang berada di Jakarta ini dikukuhkan pendiriannya, dengan Akte Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo S.H di Jakarta dengan nomor 71 tanggal 19 Juni 1963, menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Yusuf Wibisono¹⁸⁵.

Universitas Muhammadiyah Jakarta ini lalu terus tumbuh dalam perjalanannya. Universitas Muhammadiyah Jakarta yang kemudian berdiri sendiri secara otonom setelah dikukuhkan pendiriannya ini pada tahun 1963, kemudian mendirikan tiga Fakultas yaitu¹⁸⁶:

- Fakultas Hukum dengan Dekan H.M.S. Mintardja, S.H. yang kemudian digantikan oleh Ushuluddin Hutagalung, SH.
- Fakultas Ekonomi dengan Dekan pertamanya Soeroto Kartosoedarmo, S.H. dan
- Fakultas Teknik dengan Dekan pertamanya Ir. Slamet Izzan.

Peresmian tersebut telah merubah bentuk pengelolaan pendidikan tinggi Muhammadiyah yang lebih bersifat otonom berdasarkan daerah masing-masing. Hal

¹⁸⁴ Sidi Ibrahim Boechari. *Bermula dari FKIS*. dalam *50 Tahun Uhamka –Turut Mencerahkan Peradaban Bangsa 1957-2007*. UHAMKA Press. Jakarta. 2007. Hlm. 77..

¹⁸⁵ *Op. cit.* <http://www.umj.ac.id> (30 april 2007; pkl 17.00)

¹⁸⁶ *Ibid.* (30 april 2007)

ini merupakan awal bagi dimulainya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, dimana Pimpinan Muhammadiyah tingkat Daerah (PDM) dapat mengusahakan pendirian perguruan tingginya sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Walaupun harus tetap melalui persetujuan dan pengawasan dari Pimpinan Pusat namun daerah tetap berhak untuk mengelola Perguruan Tinggi (PTM)-nya sendiri secara otonom berdasarkan *Qaidah*¹⁸⁷ Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang telah ditentukan oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pusat (Mapendappu) Muhammadiyah.

Pada perkembangan berikutnya FKIP Muhammadiyah Jakarta sebagai fakultas yang tertua dari Universitas Muhammadiyah memisahkan diri dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi IKIP Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1965 dengan rektornya yang pertama Bapak A. S. Broto. Pemisahan antara FKIP menjadi IKIP ini ternyata merupakan pola perkembangan FKIP yang terjadi secara nasional dimana FKIP negeri juga memisahkan dirinya dari universitas negeri setempat, menjadi IKIP Negeri yang mandiri secara pengelolaan¹⁸⁸. Hal yang sama juga terjadi pada FKIP Muhammadiyah di daerah yang tadinya merupakan cabang dari FKIP Jakarta.

¹⁸⁷ Qa'idah ini berarti petunjuk serta peraturan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Mapendappu. penyusunan Qa'idah perguruan tinggi Muhammadiyah secara baku, baru dapat selesai pada tahun 1972 namun demikian Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan kondisi dan kebutuhan yang ada, saat ini untuk mengurus bagian pendidikan tinggi dibentuk suatu Majelis baru yang bernama Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Dikti Litbang) PP Muhammadiyah yang merupakan bentuk perkembangan dari Mapendappu Muhammadiyah. (lihat lampiran 9)

¹⁸⁸ Helius Syamsuddin, dkk. Anhar Gonggong (edt). *Op.cit.* hlm. 63.

IV. 3. 2 Desentralisasi Pendidikan Tinggi Muhammadiyah

Perubahan dari Universitas Muhammadiyah menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang otonom, telah membuat gagasan satu Universitas Muhammadiyah yang menaungi fakultas-fakultas yang berada di bawahnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Hal tersebut membawa dampak bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berada di luar Jakarta, baik yang berbentuk fakultas atau cabang dari fakultas Universitas Muhammadiyah yang berada di Jakarta. Dengan tidak adanya Presidium Universitas maka Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi Kampus Pembina bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sudah ada di beberapa daerah. Dengan fungsinya yaitu untuk membina, mengembangkan, membimbing, mengarahkan dan menetapkan visi serta misi perguruan tinggi Muhammadiyah yang akan didirikan selanjutnya di berbagai daerah.

Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Muhammadiyah di luar Jakarta sebenarnya sudah dimulai tidak lama dari berubahnya PTPG Muhammadiyah menjadi FKIP Universitas Muhammadiyah di Jakarta.

Pada saat PTPG berubah status menjadi FKIP Universitas Muhammadiyah di tahun 1958, FKIP yang ada di Jakarta ini membuka cabangnya di Surakarta dengan nama yang sama yakni FKIP, dengan demikian Universitas Muhammadiyah pada tahun itu telah memiliki dua buah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dimana yang di Surakarta sebagai cabang dari FKIP yang berada di Jakarta. FKIP di Surakarta ini terdiri dari dua Jurusan:

1. Jurusan Pendidikan
2. Jurusan Agama

Rencana pelajaran yang terdapat didalamnya diselaraskan dengan rencana FKIP Kementerian P.P.K pemerintah kecuali jurusan agama¹⁸⁹.

Sementara itu pada tahun 1958 ini penting untuk dicatat juga adalah dibukanya Akademi Tabligh Muhammadiyah di Yogyakarta. Akademi Tabligh ini cukup menarik karena ia memiliki ciri yang khusus dan berbeda, antara lain karena ia lebih banyak berada di bawah pengawasan dan pembinaan Majelis Tabligh dibandingkan Majelis Pengajaran Muhammadiyah. Dan proses pendiriannya pun terbilang lebih matang secara persiapan apabila dibandingkan dengan pendirian PTPG Muhammadiyah di Jakarta.

Setelah diadakan pembicaraan dan perundingan berkali-kali antara Pusat Pimpinan Muhammadiyah, Madjlis Tabligh dan Madjlis Pengadjaran, di Jogjakarta dan di Jakarta, dan setelah memperhatikan dan menimbang saran-saran yang sangat berharga dari pada 'alim ulama, mahaguru, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi atau universitas maka ditetapkanlah berdirinya Akademi Tabligh menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah yang berpusat di Jakarta.

Akademi Tabligh ini bertempat di Jogjakarta, didirikan dan diselenggarakan oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah Majelis Tabligh dibantu oleh Dewan Pengurus,

¹⁸⁹ Mahmud Junus. *Op.Cit.* hlm. 244. pada perkembangannya kemudian pada 18 September 1965, FKIP di Surakarta ini memisahkan diri menjadi IKIP Muhammadiyah Surakarta, mengikuti yang terjadi dengan FKIP Muhammadiyah Jakarta.

Dewan Kurator dan Secretariat Akademi. Dan lamanya kuliah adalah 3 tahun yaitu tingkatan Propaedeuse dan Baccalaureat, dengan ilmu-ilmu yang diajarkan¹⁹⁰:

- a. Da'wah wal Irsyad dengan lengkap.
- b. Tafsir.
- c. Falsafah dan Perbandingan agama.
- d. Tauhid dan aliran-aliran kepercayaan.
- e. Sejarah dan Sejarah Kebudayaan
- f. Tarikh dan Kebudayaan Islam.
- g. Hukum dan Tatanegara/organisasi
- h. Bahasa: Indonesia, Arab, Inggeris dan salah satu bahasa Daerah.

Perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya di beberapa daerah, setelah adanya desentralisasi adalah berdirinya cabang-cabang Perguruan Tinggi Muhammadiyah di daerah baik yang bersifat mandiri ataupun yang masih dibawah binaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, sampai dengan tahun 1965 adalah sebagai berikut¹⁹¹:

- Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan pengembangan dari FKIP Muhammadiyah cabang Jakarta yang didirikan pada 18 November 1960. Merupakan cikal bakal berdirinya

¹⁹⁰ "Maklumat Universitas Muhammadiyah Akademi Tabligh". Jogjakarta. 1958 (Sumber: ANRI, no panggil: 2453) lihat lampiran 7.

¹⁹¹ PP Muhammadiyah. *Direktori Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2006*. PP Muhammadiyah Majelis Diktilitbang. Yogyakarta. 2006. hlm. 1, 18, 39, 47.

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- FKIP dan Fakultas Agama Islam (FAI) Makassar cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta didirikan pada 19 Juni 1963, sebagai realisasi hasil Musyawarah Muhammadiyah Sulawesi Selatan ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah Makassar.
- FKIP Magelang cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, didirikan pada 31 Agustus 1964, kemudian dalam perkembangannya bergabung dengan IKIP Muhammadiyah Surakarta. Merupakan cikal bakal dari Universitas Muhammadiyah Magelang
- Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan (FHIK) Palembang cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta didirikan pada 1963. Pada 28 Januari 1967 FHIK berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah. Merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah Palembang.
- FKIP Purworejo cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta secara resmi berdiri pada 24 September 1964. Pada 30 Juni 1966, bergabung dengan IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Akademi Kulliyatul Muballighien Padangpanjang, Sumatera Barat didirikan pada tahun 1964. Sebagai kelanjutan dari Fakultas Falsafah dan Hukum Universitas Muhammadiyah yang harus ditutup pada tahun 1958. Berdasarkan

SK PP Muhammadiyah no 24/UM/X/1965 tanggal 10 maret 1965 diubah menjadi Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah yang tergabung dalam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

- Fakultas Hukum dan FKIP Jurusan Agama Malang cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta didirikan pada sepetember 1965 atas prakarsa tokoh-tokoh dan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Malang. Merupakan cikal bakal dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dimana pada 1 juli 1968, UMM resmi berdiri sendiri, terpisah dari UM Jakarta dengan wadah “Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Malang” sebagai penyelenggara. Sejak berdiri sendiri, pembenahan secara fisik dan non-fisik terus dilakukan.
- IKIP Muhammadiyah Purwokerto merupakan cabang IKIP Muhammadiyah Surakarta yang didirikan pada 5 April 1965. Pada awalnya terdiri dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Umum. Pada 1968 memisahkan dirinya menjadi IKIP Muhammadiyah Purwokerto. Merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Mulai dari saat itulah lantas mulai banyak bermunculan Universitas-universitas ataupun Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia hingga seperti perkembangannya saat ini, bentuk dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini dapat berbentuk:

1. Universitas
2. Institut
3. Perguruan Tinggi

4. Politeknik

5. Akademi

Bentuk lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah¹⁹²

Tidak dapat dipungkiri bahwa, saat ini Muhammadiyah merupakan suatu organisasi swasta dengan jumlah kepemilikan lembaga pendidikan tinggi terbesar di Indonesia dengan jumlah 161 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)¹⁹³ dengan bentuk yang berbeda-beda. Namun masalah yang sedang dihadapinya adalah, besarnya jumlah tersebut hanya semata-mata kuantitas sedangkan kualitas dari lembaga pendidikannya itu sendiri masih lebih banyak yang berada dibawah standar akreditasi nasional.

¹⁹² Majelis Pustaka. *Almanak Muhammadiyah tahun 1416 H*. Majelis Pustaka PP Muhammadiyah. Yogyakarta. 1995. Hlm 105; lihat juga: Majelis PPK. *Perguruan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Yayasan / Badan Hukum Yang Membina*. PP Muhammadiyah –Majelis PPK. Jakarta. 1982. Hal 2-3

¹⁹³ Tuhuleley, Said (edt). *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Suatu Keniscayaan*. Pustaka Suara Muhammadiyah. Yogyakarta. 2003. hlm. xii